

**MODEL KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DAN SWASTA DALAM  
PENANGGULANGAN *STUNTING* TAHUN 2019  
(Studi Kerjasama Pemerintah Lampung Tengah dan PT Great Giant  
Pineapple dalam Mengatasi *Stunting*)**

**Skripsi**

**Oleh**

**TIARA ZULFA EL-WANI**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

**MODEL KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DAN SWASTA DALAM  
PENANGGULANGAN *STUNTING* TAHUN 2019  
(Studi Kerjasama Pemerintah Lampung Tengah dan PT Great Giant  
Pineapple dalam Mengatasi *Stunting*)**

Oleh

**TIARA ZULFA EL-WANI**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
**SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

Pada

**Jurusan Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

**Judul** : **MODEL KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DAN SWASTA DALAM PENANGGULANGAN *STUNTING* TAHUN 2019 (Studi Kerjasama Pemerintah Lampung Tengah dan PT Great Giant Pineapple dalam Mengatasi *Stunting*)**

**Nama Mahasiswa** : **Tiara Zulfa El-wani**

**No. Pokok Mahasiswa** : **1816021029**

**Jurusan** : **Ilmu Pemerintahan**

**Fakultas** : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

**MENYETUJUI**

1. Komisi Pembimbing

**Dr. Feni Rosalia, M.Si**

NIP. 19690219 1994032001

**Lilih Muflihah, S.IP., M.IP**

NIK. 231602820509201

2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

**Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP**

NIP. 196112181989021001

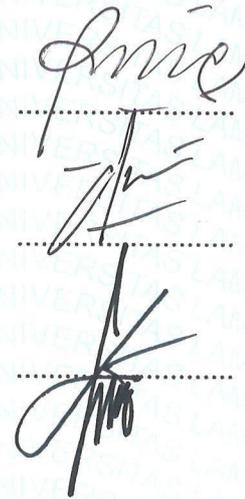
**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua : Dr. Feni Rosalia, M.Si**

**Sekretaris : Lilih Muflihah, S.IP., M.IP**

**Penguji : Drs. Denden Kurnia Drajat, M.Si**



**2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**Dra. Ida Nuraida, M.Si**

**NIP. 196108071927032001**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 11 Januari 2023**

# PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 10 Januari 2023  
Yang Membuat Pernyataan



Tiara Zulfa El-wani  
NPM.1816021029

## RIWAYAT HIDUP



Tiara Zulfa El-wani lahir di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung pada 30 Oktober 2000. Peneliti lahir dari pasangan Rahmadi Lestari dan Kartika M Kasim. Peneliti bersekolah di MI Diniyyah Putri Lampung. Kemudian tahun 2012-2015 melanjutkan pendidikan di SMPN 13 Bandar Lampung. Selanjutnya tahun 2015-2018 masuk SMKN 8 Bandar Lampung. Lalu di tahun 2018 Peneliti berhasil diterima sebagai mahasiswa di Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).

Selama kuliah, Peneliti aktif di beberapa organisasi di luar dan di dalam kampus. Organisasi dalam kampus yang Peneliti ikuti yakni BEM Universitas Lampung, FSPI FISIP Universitas Lampung, LSSP Cendikia FISIP Universitas Lampung, dan Himpunan Mahasiswa Jurusan sebagai anggota. Serta, organisasi di luar kampus yakni Klub Nonton sebagai koordinator komunitas mulai dari tahun 2021.

Peneliti juga pernah mengikuti program milik Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset Dan Teknologi yaitu Kampus Merdeka pada tahun 2021-2022. Program yang Peneliti ambil yaitu Magang Bersertifikat selama 2 semester pada PT Great Giant Pineapple di Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung.

Dengan ketekunan, motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha Peneliti telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan.

## **MOTTO**

Tidak ada kesulitan yang tidak ada ujungnya. Sesudah sulit pasti akan ada kebahagiaan.

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.  
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”

**(QS Al-Insyirah: 5-6)**

"Manusia itu mengikut agama kawannya. Maka hendaklah diperhatikan siapa yang hendak dijadikan sebagai kawannya."

**(HR Tirmidzi)**

*“The good things take time, and everyone has a good time”*

**(Tiara Zulfa El-wani)**

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Rabbil 'Aalamiin segala puji saya ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunianya dan juga meridho'i ikhtiar hamba-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dengan baik. Shalawat serta salam selalu disanjungkan kepada nabi Muhammad ﷺ yang selalu kita nantikan syafaatnya di Yaumul Akhir.

Saya persembahkan karya ilmiah ini teruntuk ...

Umi dan Abi yang selalu memberi kasih sayang serta *support* materilnya  
Rizka dan Radin yang senantiasa membantu dan menghibur saat saya kesulitan  
Dosen pembimbing yang telah membimbing saya dengan sabar  
Teman-teman Jurusan Ilmu Pemerintahan  
Serta Almamater tercinta Universitas Lampung

Saya mengucapkan terimakasih kepada pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan karya ilmiah ini

## SANWACANA

*Bismillahirrahmannirrahiim*

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur Peneliti haturkan kehadirat Allah SWT, yang berkat rahmat-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan karya ilmiah/skripsi yang sederhana ini dalam rangka memenuhi syarat untuk meraih Gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.I.P.) di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Diiring dengan itu Shalawat berserta salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga dan sahabat beliau.

Dalam penyusunan skripsi yang berjudul “Model Kerjasama Pemerintah Daerah dan Swasta dalam Penanggulangan *Stunting* (Studi Kerjasama Pemerintah Lampung Tengah dan PT Great Giant Pineapple dalam Mengatasi *Stunting*)”, Peneliti menyadari masih banyak kekurangan, baik dari segi isi maupun teknik penulisannya karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang Peneliti miliki. Selama penyusunan skripsi ini, penulis telah mendapat bimbingan dan arahan dari berbagai pihak, maka dengan itu, maka dengan segala hormat dan kerendahan hati, dalam kesempatan ini penulis haturkan banyak terima kasih kepada:

1. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.
2. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.I.P selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Syarief Makhya, M.Si selaku Pembimbing Akademik (PA).

4. Ibu Dr. Feni Rosalia, M. Si selaku Dosen Pembimbing I. Terimakasih bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Lilih Muflihah, S. IP, M. IP selaku Dosen Pembimbing II. Terimakasih atas saran, kritik, dan motivasi yang membantu Peneliti dalam proses penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Drs. Denden Kurnia Drajat, M.Si selaku Dosen Pembahas. Terimakasih sudah membantu Peneliti lebih mengeksplorasi kemampuan dan pengetahuan Peneliti dalam skripsi ini.
7. Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung yang telah mendidik dan memberikan ilmu yang bermanfaat selama Peneliti menuntut ilmu di Universitas Lampung.
8. Ibu Septice Jantika, SKM., M. Kes., selaku Kepala Seksi Keselamatan Keluarga dan Gizi, Bidang Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan Lampung Tengah, Ibu Septi Astrinasari, S. Gz., selaku Kasubid SDM dan Kebudayaan BAPPEDA Kabupaten Lampung Tengah, Bapak Indra Jaya Kesuma selaku Community Development Coordinator Great Giant Foods, Bapak Nanda Syahpradana selaku Koordinator Program Health Life Campaign Great Giant Foods, Ibu Agnes Tiwiyani, Amd. Keb., selaku Bidan Desa Puskesmas Indra Putra Subing. Ibu Widia, Amd. Keb., selaku Bidan Desa Puskesmas Buyung Udik. Terimakasih sudah mengizinkan Peneliti untuk melakukan Penelitian di organisasi-organisasi tersebut.
9. Kedua orang tua, Umi Kartika dan Abi Rahmadi Lestari yang selalu memberikan Peneliti *support* baik secara materil maupun *non* materil selama proses Peneliti menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas kasih sayang dan pengertiannya selama ini.
10. Kedua adik saya, Zidny Rizka Rahmatika dan Muhammad Radin Sempurna yang selalu ada setiap momen Peneliti baik saat Peneliti kesulitan maupun mendapat kemudahan dalam proses penelitian.
11. Sahabat-sahabatku Lili dan Rafita yang senantiasa sudah mendukung dan memberikan kritik saat proses penyelesaian skripsi. Semoga kita selalu bisa saling membantu satu sama lain setiap waktu. Akhirnya skripsi ini selesai. Terimakasih.

12. Mba Ratna, Mba Wahyuli, Mas Khairi, Mas Udin, Mba Putri, Kak Tika, Kak Ryan, Mba Riris, dan Hanna selaku tim LND HRD GGF 2022, terimakasih sudah membantu proses perizinan dan memudahkan proses penelitian yang dilakukan Peneliti sehingga skripsi ini dapat terwujud.
13. Teman-teman Magang Merdeka Kampus Merdeka Great Giant Pineapple Batch 1 dan Batch 2 yang memberikan support tiada henti satu sama lain. Akhirnya Peneliti bisa menyusul teman-teman yang sudah meninggalkan kampusnya lebih dahulu.
14. Mas Andhika, Bang Det, Bang Bangkit, Wanda, Ardi, Vicky, Helmi, Fran, Ferdy, dan Destia yang senantiasa membantu dan memberikan solusi dikala Peneliti ada kesulitan, selalu memberikan *support*, serta mau untuk diajak berdiskusi ringan sehingga Peneliti bisa menyelesaikan skripsi ini.
15. Sahabat seperjuangan Jurusan Ilmu Pemerintahan angkatan 2018. Terimakasih untuk semua hal yang telah kita lakukan bersama-sama selama beberapa tahun ini. Semoga semua kebaikan yang telah diberikan dengan ikhlas dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah SWT.
16. Almamaterku tercinta Universitas Lampung.
17. Semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu. Terimakasih banyak atas semuanya.

Peneliti berharap semoga Allah SWT membalas amal kebaikan atas bantuan dan dukungan semua pihak dalam menyelesaikan skripsi ini. Namun Peneliti menyadari keterbatasan kemampuan pada diri ini. Semoga skripsi ini berguna bagi pembaca pada umumnya.

Bandar Lampung, 11 Januari 2023

Tiara Zulfa El-wani

## **ABSTRAK**

### **MODEL KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DAN SWASTA DALAM PENANGGULANGAN *STUNTING* TAHUN 2019 (Studi Kerjasama Pemerintah Lampung Tengah dan PT Great Giant Pineapple dalam Mengatasi *Stunting*)**

**Oleh**

**Tiara Zulfa El-wani**

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan tingginya angka *stunting* di Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2018 sebanyak 25,32% akibat banyaknya balita yang kekurangan gizi di Lampung Tengah dan pemerintah belum mampu untuk secara signifikan menurunkan angka *stunting* di Kabupaten Lampung Tengah, maka dilakukan kerjasama dengan PT Great Giant Pineapple sebagai perusahaan yang memproduksi makanan bergizi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana model kerjasama pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dan PT Great Giant Pineapple dalam mengatasi *stunting*. Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif deskriptif dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa model kerjasama yang terbangun adalah model *strategic partnering* dengan menekankan pada beberapa indikator yang hasilnya yaitu tujuan kerjasama ini untuk mendapatkan pembiayaan dari swasta, mekanisme berjalannya program jangka menengah dengan kontrak tidak terbatas, pembiayaan yang ditanggung bersama antara pemerintah dan swasta, skala waktu program dengan jangka menengah dan relasi kemitraan yang berbasis kepercayaan.

**Kata Kunci:** *stunting*, kerjasama, pemerintah daerah, swasta

## **ABSTRACT**

### ***MODEL OF LOCAL GOVERNMENT AND PRIVATE PARTNERSHIP IN STUNTING REDUCTION IN 2019***

***(Study on Cooperation between Central Lampung Government and PT Great  
Giant Pineapple in Overcoming Stunting)***

***By***

**Tiara Zulfa El-wani**

*This research is motivated by the high stunting rate in Central Lampung Regency in 2018, as much as 25,32%, due to the large number of under-fives who are malnourished in Central Lampung. The government has not been able to significantly reduce the stunting rate in Central Lampung Regency, so collaboration with PT Great Giant Pineapple, a company that produces nutritious food. This study aims to find out how the collaboration model of the Central Lampung Regency government and PT Great Giant Pineapple is in overcoming stunting. This research method uses a descriptive research type, with the results of the research showing that the cooperation model that is built is a strategic partnering model with an emphasis on several indicators whose results are the purpose of this collaboration to obtain Financing, the mechanism for running a medium-term program with unlimited contracts, Financing shared between the government and the private sector, medium-term time-scale programs and partner relationships based on trust.*

***Keywords: stunting, cooperation, local government, private sector.***

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	12
1.3 Tujuan Penelitian .....	12
1.4 Manfaat Penelitian .....	12
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>14</b>
2.1 Model Kerjasama.....	14
2.1.1 Pengertian Kerjasama .....	14
2.1.2 <i>Public-Private Partnertships</i> (PPPs) .....	15
2.2 Pemerintah Daerah.....	23
2.2.1. Pengertian Pemerintah Daerah.....	23
2.2.2 Kewenangan Pemerintah .....	25
2.3 Perusahaan Swasta.....	26
2.4 <i>Stunting</i> .....	27
2.5 Kerangka Pikir Penelitian .....	28
<b>III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>32</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	32
3.2 Lokasi Penelitian.....	33
3.3 Fokus Penelitian.....	33
3.4 Informan Penelitian.....	36
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	36
3.6 Teknik Analisis Data .....	39
3.7 Teknik Keabsahan Data .....	40

<b>IV. GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN .....</b>	<b>41</b>
4.1    Gambaran Umum Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah	41
4.1.1    Sejarah Singkat Dinas Kesehatan Lampung Tengah .....	41
4.1.2    Visi Misi Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah ...	42
4.1.3    Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah.....	43
4.2    Gambaran Umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Tengah.....	49
4.2.1    Sejarah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Tengah.....	49
4.2.2    Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Tengah.....	50
4.2.3    Visi dan Misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Tengah .....	51
4.2.4    Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Tengah .....	52
4.3    Gambaran Umum PT Great Giant Pineapple .....	52
4.3.1    Sejarah PT Great Giant Pineapple.....	52
4.3.2    Visi, Strategi dan Nilai PT Great Giant Pineapple .....	53
4.3.3    Struktur Organisasi PT Great Giant Pineapple.....	56
4.4    Gambaran Umum Program Great Indonesia .....	57
4.4.1    Pihak yang Terlibat dalam Kerjasama Program Great Indonesia .....	57
4.4.2    Implementasi Program Great Indonesia .....	59
4.4.5    Pelaksanaan Program Great Indonesia 2019 .....	62
<b>V.    HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>66</b>
5.1    Hasil dan Pembahasan Model Kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah dan PT Great Giant Pineapple.....	66
5.1.1    Tujuan .....	67
5.1.2    Mekanisme.....	77
5.1.3    Pembiayaan .....	87
5.1.4    Skala Waktu .....	93
5.1.4    Relasi Kemitraan.....	100
<b>VI.    KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>107</b>
6.1    Kesimpulan .....	107
6.2    Saran .....	108
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>110</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>114</b>

**DAFTAR TABEL**

Tabel	Halaman
1.1 Persentase Balita Pendek dan Sangat Pendek (Persen) Indonesia .....	2
1.2 Persentase Balita Pendek dan Sangat Pendek (Persen) Provinsi Lampung 2016-2018 .....	3
1.3 Prevelensi <i>Stunting</i> di Provinsi Lampung 2018 .....	4
1.4 Prevelensi <i>Stunting</i> di Kabupaten Lampung Tengah 2016-2020.....	6
1.5 Penelitian Terdahulu .....	7
2.1 Model Kerjasama Pemerintah dan Swasta .....	21
4.1 Kegiatan Sosialisasi Program Great Indonesia .....	64
4.2 Kegiatan PMT Program Great Indonesia .....	64
5.1 Kegiatan PMT Program Great Indonesia .....	85
5.2 Kegiatan Sosialisasi Program Great Indonesia .....	85

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka pikir.....	31
4.1 Struktur Organisasi BAPPEDA Kabupaten Lampung Tengah.....	52
4.2 Struktur Organisasi PT Great Giant Pineapple .....	56
4.3 Pernyataan Komitmen Pelaksanaan Percepatan Pencegahan Stunting oleh TNP2K dan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah .....	58
4.4 Dokumentasi Penandatanganan Komitmen Kerjasama dalam penanganan isu <i>stunting</i> oleh Perusahaan, Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi dan Pemda Lampung Tengah .....	58
4.5 Penentuan Pelaksanaan Program Great Indonesia Tahun 2019.....	60
4.6 Lokasi Pelaksanaan Program Great Indonesia Tahun 2019.....	61
4.7 Pendistribusian Pisang dan Susu Segar.....	62
4.8 <i>Breakdown</i> Program Great Indonesia Tahun 2019 .....	62
4.9 <i>Breakdown</i> Program Great Indonesia Tahun 2019 .....	63
4.10 <i>Breakdown</i> Program Great Indonesia Tahun 2019 .....	63
4.11 Kegiatan PMT di TK Al Hidayah Buyung Udik .....	65
4.12 Kegiatan PMT di TK Islam An-Nur Gunung Batin Udik.....	65
4.13 Kegiatan PMT pemberian pengayaan, pembelajaran dan sosialisasi mengenai kebutuhan gizi dan cara asuh anak serta balita di Posyandu Gunung Batin Udik .....	65
5.1 Pendistribusian Pisang dan Susu Segar.....	75
5.2 PT Great Giant Pineapple (GGP) meraih penghargaan kategori emas (Gold) pada ajang Indonesian CSR Award (ICA) 2020 yang diadakan oleh Corporate Forum for Comunity Development (CFCD) atas apresiasi dan kinerja sosial masyarakat .....	76
5.2 Penandatanganan Komitmen Kerjasama dalam penanganan isu <i>stunting</i> oleh PT Great Giant Foods, Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi dan BAPPEDA Kabupaten Lampung Tengah.....	83

**DAFTAR SINGKATAN**

<b>BAPPEDA</b>	<b>: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</b>
<b>DBFO</b>	<b>: <i>Design Build Finance Operate</i></b>
<b>PPPs</b>	<b>: <i>Public Private Partnership</i></b>
<b>GGF</b>	<b>: Great Giant Foods</b>
<b>GGP</b>	<b>: Great Giant Pineapple</b>
<b>KBBI</b>	<b>: Kamus Besar Bahasa Indonesia</b>
<b>KEPPRES</b>	<b>: Keputusan Presiden</b>
<b>KRPL</b>	<b>: Kawasan Rumah Pangan Lestari</b>
<b>KWT</b>	<b>: Kelompok Wanita Tani</b>
<b>MoU</b>	<b>: <i>Memorandum of Understanding</i></b>
<b>PAUD</b>	<b>: Pendidikan Anak Usia Dini</b>
<b>PMT</b>	<b>: Pemberian Makanan Tambahan</b>
<b>PT</b>	<b>: Perseroan Terbatas</b>
<b>SDM</b>	<b>: Sumber Daya Manusia</b>
<b>TK</b>	<b>: Taman Kanak-Kanak</b>
<b>UU</b>	<b>: Undang-Undang</b>

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara yang dalam penyelenggaraan pemerintahan menganut sistem desentralisasi yang dapat meningkatkan kesejahteraan maupun pengentasan kemiskinan di daerah. Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, desentralisasi didefinisikan sebagai penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat, kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Dengan begitu, pemerintah daerah memiliki kewenangannya sendiri dalam mengatur urusan rumah tangganya. UU Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 14 Ayat 1 mengatur berbagai urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang salah satunya yaitu penanganan bidang kesehatan.

Kabupaten Lampung Tengah merupakan kabupaten yang berada di Provinsi Lampung dengan ibu kota kabupaten yaitu Gunung Sugih. Kabupaten ini merupakan kabupaten terluas ketiga di Lampung dengan terdiri dari 13 kecamatan. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 4.545,50 km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk sebanyak 1.483.856 jiwa. ([web.lampungtengekab.go.id/kependudukan-dan-naker](http://web.lampungtengekab.go.id/kependudukan-dan-naker)).

Pemerintah daerah sendiri memiliki fungsi utama yaitu fungsi pelayanan. Fungsi ini didasarkan bahwa masyarakat tak akan dapat berdiri sendiri memenuhi kebutuhan tanpa adanya pemerintah yang memberikan pelayanan. Pelayanan yang dibutuhkan dalam hal ini merupakan pelayanan Kesehatan. Pemerintah harus memastikan pemenuhan SDM untuk intervensi gizi, kapasitas SDM, anggaran, dukungan logistik serta

kemitraan. Selain itu, kabupaten dan kota diharapkan dapat melakukan pembinaan dan pendampingan pada kecamatan maupun desa di wilayahnya.

Salah satu permasalahan kesehatan yang ada di Lampung Tengah yaitu *stunting*. *Stunting* merupakan masalah kekurangan gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya suplai zat gizi dalam waktu lama, yang menimbulkan masalah di kemudian hari, yaitu kesulitan dalam mencapai perkembangan fisik dan kognitif yang optimal. Anak *stunting* memiliki kecerdasan intelektual (IQ) lebih rendah dari rata-rata IQ anak normal (Kementerian Kesehatan Republik PT, 2018).

*Stunting* disebabkan oleh gangguan pertumbuhan yang tidak memadai dan mengejar ketertinggalan, mencerminkan ketidakmampuan untuk mencapai pertumbuhan yang optimal, dan menunjukkan bahwa kelompok balita yang lahir sehat dapat mengalami *stunting* jika kebutuhan lebih lanjut tidak terpenuhi dengan baik. (Kementerian Pembangunan Pedesaan Daerah Cacat dan Transmigrasi, 2017; Kementerian Kesehatan Republik PT, 2016).

**Table 1.1 Persentase Balita Pendek dan Sangat Pendek (Persen) Indonesia**

<b>TAHUN</b>	<b><i>STUNTING</i></b>	<b><i>TIDAK STUNTING</i></b>
<b>2016</b>	27,54	72,46
<b>2017</b>	29,6	70,4
<b>2018</b>	30,8	69,2

(Sumber: Badan Pusat Statistik)

**Table 1.2 Persentase Balita Pendek dan Sangat Pendek (Persen)  
Provinsi Lampung 2016-2018**

<b>TAHUN</b>	<b><i>STUNTING</i></b>	<b>TIDAK <i>STUNTING</i></b>
<b>2016</b>	24,78	75,22
<b>2017</b>	31,6	68,4
<b>2018</b>	27,3	72,7

(Sumber: Badan Pusat Statistik)

*Stunting* adalah isu malnutrisi paling banyak terjadi di Indonesia. Menurut UNICEF (2017), prevelensi *stunting* Indonesia mendapatkan posisi kedua pada tahun 2015 sebagai kasus prevelensi *stunting* tertinggi di kawasan ASEAN. Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013, prevalensi balita *stunting* terus mengalami peningkatan dari tahun 2007 sebesar 36,8%, 2010 sebesar 35,6%, dan 2013 menjadi 37,2% (Riskesdas, 2013).

Hasil Pemantauan Status Gizi (PSG) tahun 2017, prevalensi *stunting* telah mengalami penurunan menjadi 29,6% (Kemenkes RI, 2018), namun angka tersebut masih cukup tinggi, sehingga pemerintah memasukkan program penurunan prevalensi balita *stunting* sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional periode 2015-2019 (Kemenkes RI, 2016). Pada tahun 2018 Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia membuat Strategi Nasional Percepatan Pencegahan *Stunting* 2018-2024 (TNP2K, 2018). Lampung berada pada urutan ke-10 sebagai provinsi dengan kategori *stunting* sangat tinggi (>40%) dan kabupaten Lampung Tengah adalah kabupaten dengan kejadian *stunting* paling tinggi di Provinsi Lampung yaitu 52,7% pada tahun 2015 (Kemenkes RI, 2018, Profil Kesehatan Provinsi Lampung, 2015, Dinas Kesehatan Lampung Tengah, 2018).

**Table 1.3 Prevelensi *Stunting* di Provinsi Lampung 2018**

<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase</b>
Way Kanan	36,09
Lampung Barat	32,96
Tulang Bawang	32,45
Tulang Bawang Barat	32,14
Tanggamus	29,87
Lampung Selatan	29,08
Pesawaran	28,28
Lampung Utara	26,68
Lampung Tengah	25,32
Bandar Lampung	25,14
Pesisir Barat	24,43
Lampung Timur	21,31
Pringsewu	20,28
Metro	14,7

(Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Lampung 2018)

Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah telah melakukan berbagai upaya untuk menurunkan angka prevelensi *stunting* pada masyarakatnya seperti pelaksanaan posyandu untuk balita dengan frekuensi 1 kali dalam sebulan. Namun belum mampu secara signifikan menurunkan angka *stunting* di Kabupaten Lampung Tengah, maka dilakukan kerjasama dengan PT Great Giant Pineapple.

PT. Great Giant Pineapple merupakan sebuah perusahaan Agro Industri yang bergerak dalam Bidang Perkebunan dan Pengalengan Nanas, perusahaan tersebut berlokasi di Lampung tepatnya Lampung Tengah.

Perusahaan ini salah satu dari group perusahaan agro industri terbesar di PT yang bernama Gunung Sewu Group.

PT Great Giant Pineapple menjadi perusahaan penghasil nanas kalengan terbesar ketiga di dunia dengan lebih dari 33 negara tujuan ekspor dan menguasai 20% dari pangsa pasar nanas kaleng di dunia atau dengan kata lain, 1 dari 5 produk nanas kaleng yang beredar di dunia adalah produk dari PT Great Giant Pineapple. Saat ini PT Great Giant Pineapple memasarkan 20 jenis buah, mulai dari jambu biji, pepaya, nanas, mangga, pisang, anggur, jeruk, apel, melon, kiwi, hingga pir. PT Great Giant Pineapple memiliki kebun grup sendiri yang menghasilkan tiga jenis buah, yaitu pisang cavendish, jambu biji, dan nanas honi yang merupakan hasil impor adalah produk kiwi, apel, dan anggur. PT Great Giant Pineapple memiliki jaringan distribusi yang luas, dan konsumen yang tetap baik pasar moderen maupun tradisional, sehingga dipercaya untuk memasarkan kiwi Zespri asal Selandia Baru dan pir Truval asal Belgia dalam merek Sunpride di Indonesia. Komposisi produk Sunpride adalah 20% impor, 15% buah lokal dari petani dan pengusaha kecil, sisanya berasal dari perkebunan sendiri milik grup (sumber: *Sustainability Report* GGF 2019).

Sebagai salah satu perusahaan *brand entity* yang memproduksi kluster makanan berupa buah-buahan berkualitas serta memproduksi makanan tinggi protein seperti daging dan susu di Lampung Tengah, PT Great Giant Pineapple menyadari bahwa disekitar wilayah kerjanya masih banyak sekali terjadi kasus *stunting*. Untuk itu, PT Great Giant Pineapple turut serta dalam upaya membantu pengentasan *stunting* melalui program Great Indonesia dengan pemberdayaan masyarakat melalui pemberian sosialisasi dan pendampingan pencegahan *stunting* dengan menutrisi masyarakat melalui produk yang dihasilkan.

Dalam hal ini, PT Great Giant Pineapple memiliki tujuan yang sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah yaitu melakukan pencegahan *stunting* di Kabupaten Lampung Tengah. PT Great Giant Pineapple melihat adanya peluang yang baik untuk melaksanakannya

sebagai tanggung jawab sosial dari perusahaan karena PT Great Giant Pineapple melihat banyaknya kasus *stunting* yang dalam hal ini pemerintah belum mampu mengentaskannya.

Great Indonesia merupakan program kolaborasi antara perusahaan dengan pemerintah dan masyarakat yang sudah berjalan sejak tahun 2019. Pemerintahan yang ikut dalam program Great Indonesia ini yaitu Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi dan Pemerintah Lampung Tengah yang diajak untuk menguatkan komitmennya dalam melakukan Pencegahan *stunting* di Lampung Tengah melalui Piagam Komitmen Kerjasama yang ditandatangani di *Training Center* Great Giant Foods pada 17 Juli 2019.

**Tabel 1.4 Prevelensi *Stunting* Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016-2020**

<b>Tahun</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Persentase</b>	26,2	37	25,32	13,98	13,34

(Sumber: Riset Kesehatan Nasional)

Berdasarkan *Sustainability Report* Great Giant Foods 2019/2020, program Great Indonesia menghadirkan 3 langkah utama. Pertama, pola asuh dengan target sasaran ibu hamil, ibu menyusui, dan wanita usia subur. Kedua, pola makanan dengan target sasaran anak usia dini, lebih dari 600 anak di 12 PAUD. Ketiga, Sanitasi dengan target sasaran warga melalui Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) (sumber: *Sustainability Report* GGF 2019).

Kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah dan PT Great Giant Pineapple dalam program Great Indonesia menurut koordinator program *Health Life Campaign* GGF, Nanda Syahpradana menjelaskan bahwa program ini membantu menurunkan angka *stunting* di Lampung Tengah sehingga pada 2019 turun sebesar 18 persen. Kasubid SDM dan Kebudayaan Bappeda Lampung Tengah, Septi Astrinasari juga menyampaikan bahwa tahun 2019 prevalensi *stunting* di

Lampung Tengah telah turun menjadi 13,85 persen (sumber: <https://radarlampung.co.id/ggf-luncurkan-program-great-indonesia/> diakses pada 11 Agustus 2022).

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, Peneliti juga membandingkan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan diteliti. Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Dalam penelitian ini tidak terlepas dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan tujuannya untuk mendukung penelitian ini. Berikut merupakan beberapa penelitian yang dijadikan referensi dalam penelitian ini:

**Tabel 1.5 Penelitian Terdahulu**

No	Penulis	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Rahmatullah. 2012	Model Kemitraan Pemerintah Dengan Perusahaan Dalam Mengelola CSR: Studi Kasus Di Kota Cilegon (Jurnal)	Jenis kajian ini deskriptif, menggunakan pendekatan kualitatif.	Hasil kajian ini menyarankan agar status hukum CCSR ditingkatkan dari Peraturan Walikota (Perwal) menjadi Peraturan Daerah (Perda), lembaga CCSR perlu memaksimalkan sosialisasi, agar bertambahnya jumlah perusahaan yang menjadi anggota CCSR, CCSR perlu membuat basis data dan memiliki program prioritas sendiri, serta perlunya pelibatan masyarakat dalam seluruh tahapan program.
2.	Khoirul Abror Ad-Dluha Ghoni. 2019	Penerapan <i>Public Private Partnership</i> dalam Pelaksanaan	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis	Hasil temuan dilapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan program CSR

		<p>Program <i>Corporate Social Responsibility</i> Di Bidang Pendidikan (Studi Kasus Pelaksanaan <i>Corporate Social Responsibility</i> PT. Kaltim Prima Coal di Kecamatan Bengalon) (Tesis)</p>	<p>penelitian deskriptif. Untuk analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif model interaktif dari Miles, Huberman dan Saldana</p>	<p>merujuk pada Crowther dan Aras (2008) yaitu <i>accountability</i>, <i>transparency</i> dan <i>sustainability</i> telah dilaksanakan dengan baik dilihat dari pelaksanaan CSR di Kecamatan Bengalon. Pada penerapan perspektif PPP yang merujuk kepada Yescombe (2007) bahwasannya PPP berhasil diterapkan apabila telah mencakup tiga poin yaitu kontrak, desain dan <i>financial</i> dan dalam pelaksanaan CSR di bidang pendidikan di Kecamatan Bengalon ketiga poin yang merujuk pada Yescombe (2007) telah dilaksanakan semua oleh pelaksana program CSR.</p>
3.	<p>Djabbari, Muh Hidayat. Alwi. Tamrin, Saddam Husain. 2021</p>	<p>Implementasi <i>Public Private Partnership</i> dalam Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Toraja (Jurnal)</p>	<p>Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi dan studi dokumentasi..</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) <i>Equity</i> menunjukkan adanya <i>win-win solution</i> dalam pembagian kerjasama yang berdampak pada penerimaan retribusi dan pelayanan pariwisata; (2) <i>Effectiveness</i> yang ada didalam tujuan MoU (perjanjian kerjasama)</p>

				<p>berjalan dengan efektif dalam menarik pendapatan (retribusi) dan memberikan layanan kepada pengunjung atau wisatawan; (3) <i>Effisiensi</i> dalam kerjasama pemerintah-swasta ini menunjukkan pemanfaatan sumber daya dalam pembangunan objek wisata yang terbukti lebih efisien dengan adanya pelibatan sektor swasta; (4) <i>Exportability</i> menunjukkan pemerintah mendapatkan resiko permintaan yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan objek wisata dan ganti rugi kepada masyarakat yang terdampak dalam pembangunan sarana dan prasarana objek wisata.</p>
4.	Bahtiar Rifai. 2014	Implementasi Kerja Sama Pemerintah dan Swasta Dalam Pembangunan Infrastruktur Sektor Air Minum Di Indonesia (Jurnal)	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan pada tahun 2013 yang dilakukan di tiga provinsi, yaitu Jawa Timur, Banten	Hasil analisa menunjukkan bahwa KPS Air Minum di Indonesia diimplementasikan dalam beberapa model. KPS terpanjang masa konsesinya berada di Jakarta yang merupakan kerja sama antara PAM JAYA (Jakarta Raya)

			(Tangerang) dan DKI Jakarta. Penelitian berbasis data primer dan sekunder.	dengan investor Singapura (PT AETRA) dan Perancis (PT Lyonnaise Jaya). Sangat disayangkan keterlibatan pihak swasta dalam penyediaan air minum di Jakarta belum mampu meningkatkan performa secara signifikan terhadap pelayanan maupun kinerja perusahaan akibat lemahnya pengelolaan maupun posisi tawar PT PAM Jaya dalam kontrak kerja sama. Tangerang merupakan salah satu model yang cukup ideal dalam penyediaan infrastruktur air minum, meskipun belum sepenuhnya KPS, yang mana cenderung murni investasi pihak swasta.
5.	Arya Utama. 2017	Analisis Hubungan Kemitraan Pemerintah Daerah, Swasta, dan Masyarakat dalam Pelaksanaan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) PT Vale Indonesia Bidang Pendidikan dan	Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan mengurai data secara deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, studi pustaka, serta	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemitraan yang terbangun dalam pelaksanaan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) antara Pemerintah, Swasta dan Masyarakat khususnya dibidang pendidikan dan kesehatan belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari jalinan

		Kesehatan Kabupaten Luwu Timur (Jurnal)	dokumentasi dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif.	komunikasi antara kedua aktor dalam kerjasama tersebut berjalan harmonis dan berlangsung secara dua arah. Namun, kerjasama tersebut banyak yang tidak dituangkan secara tertulis ke dalam <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU), sehingga kemitraan bersifat semu. Pola kemitraan yang terbangun tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mendukung maupun menghambat. Faktor pendukung meliputi kebijakan terkait Corporate Social Responsibility (CSR), Keterlibatan pemerintah, swasta, dan masyarakat sebagai aktor dalam pengelolaan program CSR. Faktor penghambat meliputi Komunikasi dan Koordinasi terkait Program CSR disektor Pendidikan dan Kesehatan.
--	--	---	---	---

(Sumber: Diolah Peneliti, 2022)

Secara keseluruhan terdapat beberapa perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu di atas. Persamaan dari penelitian, di mana ruang lingkup penelitian ini adalah kerjasama pemerintah dan

swasta, ada pula yang membahas tentang penanggulangan *stunting* serta penerapan *public private partnership* dalam kerjasama pemerintah daerah dan swasta. Sementara perbedaan dengan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu adalah Peneliti mengkaji bagaimana model kerjasama yang dilakukan pemerintah daerah dan swasta dalam penanggulangan *stunting* pada Pemerintah Lampung Tengah dan PT Great Giant Pineapple. Metode dalam penelitian bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk menggambarkan fenomena yang terjadi.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka Peneliti tertarik untuk menulis tentang judul sebagai berikut: “Model Kerjasama Pemerintah Daerah dan Swasta Dalam Penanggulangan *Stunting* Tahun 2019 (Studi Kerjasama Pemerintah Lampung Tengah dan PT Great Giant Pineapple dalam Mengatasi *Stunting*)”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi adalah bagaimana model kerjasama Pemerintah Lampung Tengah dan PT Great Giant Pineapple dalam mengatasi *stunting* tahun 2019?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan permasalahan di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui model kerjasama Pemerintah Lampung Tengah dan PT Great Giant Pineapple dalam mengatasi *stunting* tahun 2019

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penulisan penelitian ini diharapkan bermanfaat, yaitu:

### **a. Manfaat Teoritis**

Penulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian untuk memberikan informasi terkait kerjasama pemerintah dan swasta yang berkaitan dengan *stunting* dan tanggung jawab perusahaan dibidang ilmu pemerintahan khususnya mengenai politik desentralisasi dan otonomi daerah.

b. Manfaat praktis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah, swasta dan masyarakat umum untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta referensi mengenai model kerjasama Pemerintah Lampung Tengah dan PT Great Giant Pineapple dalam mengatasi *stunting*.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Model Kerjasama

#### 2.1.1 Pengertian Kerjasama

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian kerjasama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang (lembaga, pemerintah, dan sebagainya) untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama adalah istilah yang bersumber dari istilah dalam bahasa Inggris *cooperation*. Menurut Rosen (dalam Ikasari, 2018), *cooperation* adalah kerjasama yaitu upaya yang dilakukan untuk mendapatkan atau sumber efisiensi dan kualitas pelayanan. Menurut Abdulsyani (dalam Ikasari, 2018), kerjasama adalah suatu bentuk proses sosial, di mana di dalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami aktivitas masing-masing.

Kemudian dikemukakan menurut Tatiek Sri Djatmiati (dalam Ikasari 2018), kerjasama antarpemerintahan maupun swasta terbagi menjadi kerjasama antarpemerintahan yaitu, kerjasama antarpemerintahan dalam tingkat pemerintahan yang sama atau horizontal, dan kerjasama antarpemerintahan dalam tingkat pemerintahan yang tidak sama atau bersifat vertikal. Kemudian, Kerjasama antara pemerintah dan swasta.

Kerjasama merupakan bentuk dari kemitraan. Menurut Mustafa (2017:69) kemitraan dalam banyak pengalaman menunjukkan jika para pihak yang terlibat sejak awal telah melakukan pemahaman jika mereka

akan melakukan apa yang disebut kerjasama. Ini merujuk pada pemahaman terhadap adanya arena aktivitas yang memerlukan peran lebih dari satu aktor.

Sehingga, kerjasama yang juga merupakan bentuk kemitraan terjadi karena adanya dua pihak atau lebih yang berinteraksi atau menjalin hubungan-hubungan untuk mencapai tujuan bersama dengan membantu satu sama lain dan saling memahami aktivitas masing-masing

### **2.1.2 Public-Private Partnerships (PPPs)**

Definisi kerjasama pemerintah dan swasta atau *Public Private Partnerships (PPPs)* adalah kemitraan antara sektor pemerintah dan sektor swasta untuk tujuan memberikan sebuah proyek atau layanan yang secara tradisional disediakan oleh pemerintah (*Departement of the Environment and Local Government* dalam Ghoni, 2019).

Dalam makna sempit, Kooiman (dalam Mustafa, 2017:76) menyatakan PPPs mengacu pada bentuk kerjasama antara pihak publik dan swasta yang diinformalkan secara legal/hukum (*joint-ventures*), sementara makna luas juga memasukkan *platform* konsultatif yang diinformalkan. Menurut William J. Parente dari USAID Environmental Services Program mendefinisikan PPP

*”an agreement or contract, between a public entity and a private party, under which : (a) private party undertakes government function for a specified period of time, (b) the private party receives compensation for performing the function, directly or indirectly, (c) the private party is liable for the risks arising from performing the function and, (d) the public facilities, land or other resources may be transferred or made available to the private party”* (<https://www.djkn.kemenkeu.go.id>)

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diambil beberapa karakteristik dalam PPPs diantaranya adanya persetujuan antara pihak pemerintah dengan pihak swasta, pihak swasta menjalankan fungsinya dalam pemanfaatan aset dalam jangka waktu tertentu, kedua belah pihak

menerima kompensasi secara langsung maupun tidak langsung, dan pihak swasta bertanggung jawab atas risiko yang ditimbulkan pada saat pelaksanaan kerjasama. Konsep PPPs dapat menguntungkan negara sebagai pemilik aset dikarenakan pihak swasta dapat menyediakan bantuan dana dalam pembangunan infrastruktur dan menjalankan operasional apabila aset yang dijadikan objek telah selesai proses pembangunan. Masing-masing pihak juga mendapatkan keuntungan baik secara langsung maupun tidak langsung dari kerjasama ini. Hal ini tentunya menguntungkan pemerintah sebagai pemilik aset serta sektor swasta itu sendiri.

PPPs dalam penerapannya memerlukan prakondisi yang mendukung. Prakondisi tersebut haruslah dipenuhi secara keseluruhan. Alasan-alasan diterapkannya PPPs diantaranya adalah (*The Stationery Office*, dalam Ghoni, 2009) :

1. Pemerintah menghadapi keterbatasan dana dan sumber daya manusia yang kompeten dalam menyediakan pelayanan tersebut.
2. Pihak swasta dapat memberikan pelayanan dengan kualitas yang lebih baik dibandingkan bila diberikan oleh pemerintah.
3. Pihak swasta dapat menjamin bahwa pelayanan dapat diberikan lebih cepat dibandingkan bila disediakan oleh pemerintah.
4. Ada dukungan dari pengguna jasa untuk melibatkan pihak swasta sebagai penyedia layanan.
5. Ada peluang kompetisi di antara para calon mitra swasta.
6. Tidak ada ketentuan perundang-undangan yang melarang pelibatan swasta dalam penyediaan jasa layanan.
7. Output dari pelayanan dapat dengan mudah diukur dan ditetapkan tarifnya dengan rasional.
8. Biaya pelayanan dapat diperoleh kembali melalui penetapan tarif penggunaan jasa layanan.
9. Ada peluang inovasi dalam penyediaan layanan.

10. Ada rekam jejak (*track record*) atau pengalaman kemitraan antara pemerintah dan swasta yang sudah dilakukan sebelumnya.
11. Ada peluang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kemitraan tersebut.

Menurut Skelcher (dalam Mustafa, 2017:77) bentuk dari PPPs ada 5 yaitu *Public Leverage*, *Contacting-out and competitive tendering*, *Franchising*, *Joint Ventures*, dan *Strategic Partnering*. Gambaran singkat dari masing-masing bentuk PPPs tersebut yaitu:

1. *Public Leverage*, yaitu kemitraan yang terjadi di mana pemerintah menggunakan sumberdaya hukum dan finansial untuk menciptakan kondisi yang mereka yakini dan kondusif terhadap aktivitas ekonomi dan pertumbuhan bisnis. Model ini menggunakan terminologi “*Leader-Follower*” yang dimaksudkan bagaimana pemerintah mendorong dan mempengaruhi para pengambil keputusan sektor privat untuk sejajar dengan tujuan kebijakan publik. Wujud nyata model ini dapat dilihat pada penciptaan kondisi yang menarik bagi sektor swasta untuk melakukan investasi dan pengembangan usaha di sektor publik.

*Public Leverage* atau solvabilitas publik juga terjadi di mana pemerintah menginginkan sektor bisnis atau organisasi non profit dengan cara merealisasikan suatu tujuan yang hanya mungkin dicapai melalui birokrasi publik. Contohnya subsidi pemerintah terhadap para pengembang privat perumahan bagi keluarga berpenghasilan rendah.

Dari sisi dimensi tujuan dan perspektif pemerintah, publik *leverage* ini dimaksudkan untuk menciptakan syarat-syarat yang menarik bagi investasi sektor swasta dan pengembangan bisnis. Sedangkan dari segi mekanismenya, pemerintah menyediakan lahan untuk pengembangan industri, penyedia keuntungan-keuntungan pajak serta subsidi lainnya. Dengan tujuan dan mekanisme yang

demikian itu, maka model pembiayaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Model semacam ini biasanya dilakukan untuk waktu yang cukup panjang malah kadang tidak terbatas.

2. *Contracting-Out* dan Tender Kompetitif yaitu kemitraan yang melibatkan pemisahan pembeli (*purchaser*) sebuah jasa dari penyedia (*provider*). Kemitraan ini dimaksudkan untuk mengurangi pembiayaan, pencapaian efisiensi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik melalui prosedur kontrak dan tender kompetitif. Mekanisme pelaksanaan kontak keluar ini biasanya adalah menetapkan ketentuan layanan publik melalui kontrak bisnis, lembaga non profit atau agen pemerintah lainnya. Kadang-kadang menggunakan tender kompetitif untuk mengimbangi provider pemerintah yang sudah ada.

Pembiayaan dalam model ini sepenuhnya oleh pemerintah untuk rentang waktu pendek hingga menengah dan relatif pasti. Kemitraan semacam ini merupakan metode yang efektif untuk menjalankan fungsi pemerintah. Ini tidak dimaksudkan untuk mengganti peran pegawai di lingkungan pemerintahan melainkan untuk meningkatkan peran pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

3. *Franchising* dilaksanakan dengan pemerintah memberikan lisensi kepada *private sector* atau organisasi *non profit* untuk menyampaikan layanan publik di mana *income* dari *provider* adalah dalam bentuk *user fee*. Proses pengalokasian hak-hak tersebut mungkin dilakukan secara kompetitif atau menawarkan kepada *provider* potensial *cash value* untuk memperoleh *franchise*.

Kemitraan ini dimaksudkan untuk mentransfer manajemen publik kepada sektor komersil. Mekanismenya adalah pemberi lisensi oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan dalam konteks

kepentingan publik. Pembiayaan model ini dapat berupa subsidi untuk kegiatan yang tidak bersifat ekonomis namun dibutuhkan secara sosial. Retang waktu dari *franchise* adalah menengah hingga jangka panjang dengan periode yang telah ditetapkan.

4. *Joint Venture* dan *Design Build-Finance-Operate* (DBFO). Kemitraan *Joint venture* atau usaha patungan terjadi ketika dua atau lebih pihak terlibat pada sebuah proyek kolaboratif dengan cara mempertahankan independensi mereka. *Joint venture* yakni menyerahkan proyek pemerintah kepada sektor bisnis untuk berbagi resiko dengan sistem bagi hasil.

Sedangkan DBFO melibatkan pemerintah untuk menghasilkan kemudian ke dalam hubungan kontraktual jangka panjang dengan sebuah perusahaan atau konsorium yang bertanggung jawab untuk mendesain, membiayai, membangun fasilitas, serta mengelola dan memberikan beberapa layanan yang berhubungan dengan itu (memelihara, membersihkan dan keamanan).

Model ini tujuan dalam perspektif pemerintah bertujuan untuk mengantarkan proyek-proyek di mana pemerintah memiliki kepentingan bersama dengan bisnis-bisnis untuk keperluan profit atau tidak untuk profit. Mekanismenya yang dilakukan adalah kontrak kemitraan antara pemerintah dan swasta mencakup modal kerja dan biaya pelaksanaan selanjutnya. Karena itu sumber pembiayaan model ini adalah pemerintah bersama swasta dengan kontrak jangka panjang yang telah ditentukan.

5. *Strategic Partnering* yaitu kemitraan jangka menengah sampai jangka panjang antara pemerintah dan swasta melalui proses kebijakan publik. Ada batasan dalam pelaksanaan kemitraan dengan pemisahan pihak-pihak konstituen dan terdapat praktek pengorganisasian transparan yang dimaksudkan untuk menghasilkan mutual yang menguntungkan. Tekanan dalam

kemitraan ini adalah keterbukaan, berbagai resiko dan *reward* bersama, serta mengembangkan konten *substantif* dari tindakan yang muncul. Kemitraan ini memungkinkan pemerintah untuk memperoleh pembiayaan yang signifikan dan proses-proses kemitraan yang melampaui masa waktu jangka menengah ke jangka panjang. Sumber pembiayaan model ini adalah pemerintah, meskipun juga dapat menyertakan pihak swasta.

Secara konseptual prinsip dasar kerjasama pemerintah daerah dan swasta adalah dengan menempatkan pemerintah sebagai kompeten utama dengan pembagian kekuasaan lebih besar berada di pemerintah. Pemerintah menjadi roda utama penggerak kerjasama yang terjadi diantara pemerintah dan swasta sehingga berhasil atau tidaknya kerjasama ini dilihat melalui model kerjasama yang dilakukan antara keduanya.

Dari kelima bentuk-bentuk *Public Private Partnerships* (PPPs) yang sudah dijelaskan, perbandingannya dapat dilihat pada tabel berikut dengan tekanan pada dimensi tujuan, mekanisme, pembiayaan, skala waktu, dan relasi kemitraan.

Table 2.1 Model Kerjasama Pemerintah dan Swasta

Dimensi	<i>Public Leverage</i>	<i>Contracting-Out</i> dan Tender Kompetitif	<i>Franchising</i>	<i>Joint Venture</i> dan <i>Build-Design</i>	<i>Strategic Partnering</i>
Tujuan	Menciptakan syarat-syarat yang menarik untuk mencari investor	Mengurangi pembiayaan, pencapaian efisiensi, peningkatan kualitas, dan tanggung jawab manajemen tenaga kerja pemerintah	Menransfer manajemen pemerintahan kepada sektor komersial	Mengantarkan proyek-proyek di mana pemerintah memiliki kepentingan bersama dengan bisnis-bisnis untuk keperluan profit atau non profit	Memungkinkan pemerintah memperoleh pembiayaan yang signifikan dan proses-proses kemitraan yang melampaui masa waktu jangka menengah ke jangka panjang
Mekanisme	Pemerintah menyediakan lahan dan pengembangan industri, penyediaan keuntungan-pajak, menggunakan tender kompetitif untuk mengimbangi provider pemerintahan yang sudah ada	Menetapkan ketentuan layanan publik melalui kontrak bisnis, lembaga non profit, atau agen pemerintah lainnya. Kadang menggunakan tender kompetitif untuk mengimbangi provider pemerintahan yang sudah ada	Bisnis-bisnis ataupun yang tidak untuk profit diberikan lisensi oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan dalam kerangka kepentingan publik	Kontrak kemitraan antara pemerintah dan swasta mencakup modal-modal kerja dan biaya pelaksanaan selanjutnya	Kemitraan jangka panjang dan tidak terbatas antara pemerintah dan aktor-aktor swasta berdasarkan kepercayaan dan kebersamaan melebihi kontrak secara formal, bahkan mungkin melingkupi elemen-elemen di luar kontrak dan <i>franchise</i> usaha bersama.
Pembiayaan	Negara	Negara	Dimungkinkan mensubsidi secara tegas provisi yang tidak bersifat ekonomis tetapi dibutuhkan secara sosial. Menyediakan basis untuk mengakses pembiayaan melalui pasar	Swasta bersama pemerintah membiayai ulang ongkos-ongkos dalam jangka panjang	Pemerintah, meskipun dapat menyertakan pihak swasta

Dimensi	<i>Public Leverage</i>	<i>Contracting-Out</i> dan Tender Kompetitif	<i>Franchising</i>	<i>Joint Venture</i> dan <i>Design Build</i>	<i>Strategic Partnering</i>
Skala Waktu	Jangka menengah, tidak terbatas	Kontrak dengan jangka waktu yang pasti yaitu jangka pendek hingga jangka menengah	Menengah hingga jangka panjang	Jangka panjang dengan jangka waktu yang telah ditentukan	Jangka menengah sampai jangka panjang. Relasi kontrak yang tidak terbatas
Relasi Kemitraan	Pemerintah mencari cara untuk mencari mitra bisnis	Belanja publik; swasta ataupun supplier yang tidak berorientasi profit	Provisi swasta di bawah aturan pemerintah	Komisi pemerintahan dan spesifikasi keluaran proyek dan berkomitmen untuk membayar ulang biaya. Membiayai mitra swasta dan membangun, mengatur, mengoperasionalkan fasilitas	Relasi berbasis kepercayaan, memperhatikan kolaborasi antar organisasi, serta menggantikan instrumen hukum dengan kepercayaan.

(Sumber: Mustafa, 2017: 77)

## **2.2 Pemerintah Daerah**

### **2.2.1. Pengertian Pemerintah Daerah**

Pemerintahan Daerah dikembangkan berdasarkan azas otonomi (desentralisasi) dan tugas pembantuan. Azas dekonsentrasi hanya diterapkan di daerah-daerah provinsi dan kabupaten/kota yang belum siap atau belum sepenuhnya melaksanakan prinsip otonomi sebagaimana ditentukan dalam Undang Undang Dasar. Karena itu, hubungan yang diharapkan antara pemerintah pusat dengan daerah provinsi, dan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota adalah hubungan yang tidak bersifat hirarkis. Namun demikian, fungsi koordinasi dalam rangka pembinaan otonomi daerah dan penyelesaian permasalahan antar daerah, tetap dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi sebagaimana mestinya.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 serta Pasal 1 UUD 1945, pemerintah di daerah dilaksanakan melalui tri asas, yaitu asas desentralisasi, asas dekonsentrasi (dekonsentrasi) dan asas tugas pembantuan.

Pada Pasal 1 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan tentang tri asas yaitu asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan.

1. Desentralisasi yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dekonsentrasi yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
3. Tugas Pembantuan yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.

Secara umum terdapat 4 fungsi pemerintah yakni fungsi pelayanan (*service*), fungsi pengaturan (*regulating*), fungsi pembangunan (*development*), dan fungsi pemberdayaan (*empowerment*).

#### 1. Fungsi Pelayanan

Fungsi utama pemerintah adalah memberikan pelayanan (*service*) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat disemua sektor. Masyarakat tak akan dapat berdiri sendiri memenuhi kebutuhan tanpa adanya pemerintah yang memberikan pelayanan. Untuk itu pemerintah memberikan layanan publik terhadap warga negaranya.

#### 2. Fungsi Pengaturan

Selain fungsi pelayanan, fungsi utama pemerintah lainnya adalah fungsi pengaturan. Pemerintah memiliki fungsi pengaturan (*regulating*), yakni mengatur seluruh sektor dengan kebijakan-kebijakan dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan lainnya, guna terciptanya stabilitas negara dan pertumbuhan negara.

### 3. Fungsi Pembangunan

Fungsi pembangunan merupakan salah satu fungsi sekunder pemerintah. Fungsi ini dijalankan jika kondisi masyarakat melemah dan pembangunan akan dikontrol ketika kondisi masyarakat membaik. Negara-negara berkembang menjalankan fungsi ini lebih gencar daripada negara maju yang sudah bagus infrastrukturnya.

### 4. Fungsi Pemberdayaan

Fungsi pemerintah yang terakhir adalah fungsi pemberdayaan (*empowerment*). Fungsi ini dijalankan jika masyarakat tidak mempunyai skill dan kemampuan khusus, di mana pemerintah wajib melakukan pemberdayaan dengan cara meningkatkan kualitas SDM atau masyarakat tersebut. (sumber: <https://www.seluncur.id/fungsi-pemerintah/> diakses 11 Agustus 2022)

## 2.2.2 Kewenangan Pemerintah

Pembicaraan mengenai otonomi daerah tidak dapat lepas dari hubungan penyelenggaraan pemerintahan, antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam konteks bentuk negara kesatuan. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa : Negara Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik. Selanjutnya dalam Pasal 18 ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 1945 menyatakan: Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerahdaerah propinsi, dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah yang diatur dengan undang undang.

Urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang No. 32 Tahun 2004, yaitu :

1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan;
2. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
3. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
4. Penyediaan sarana dan prasarana umum;
5. Penanganan bidang kesehatan;
6. Penyelenggaraan pendidikan;
7. Penanggulangan masalah sosial;
8. Pelayanan bidang ketenagakerjaan;
9. Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah;
10. Pengendalian lingkungan hidup;
11. Pelayanan pertanahan;
12. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil;
13. Pelayanan administrasi umum pemerintahan;
14. Pelayanan administrasi penanaman modal;
15. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya;
16. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

### **2.3 Perusahaan Swasta**

Perusahaan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya (UU Nomor 40 tahun 2007 tentang PT).

Perusahaan swasta bentuk hukumnya dapat berwujud perusahaan perseorangan, perusahaan persekutuan yang bukan atau tidak berbadan hukum dan perusahaan persekutuan yang berbadan hukum, sedang perusahaan Negara didirikan dalam bentuk badan hukum. Pada UU Nomor 12 Tahun 1962 pasal 1 Tentang Bank Pembangunan Swasta menyatakan bahwa perusahaan swasta adalah perusahaan yang seluruh modal dan pimpinannya berada di tangan pihak swasta warga negara Indonesia atau sebagian terbesar dari modalnya dan pada dasarnya.

Menurut rumusan Pasal 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, dikemukakan bahwa perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Dalam hal ini, Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan ditentukan bahwa, perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

#### **2.4 *Stunting***

Balita Pendek (*Stunting*) adalah status gizi yang didasarkan pada indeks PB/U atau TB/U di mana dalam standar antropometri penilaian status gizi anak, hasil pengukuran tersebut berada pada ambang batas (Z-Score)  $<-2$  SD sampai dengan  $-3$  SD (pendek/ *stunted*) dan  $<-3$  SD (sangat pendek / *severely stunted*). *Stunting* adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu cukup lama akibat pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. *Stunting* dapat terjadi mulai janin masih dalam kandungan dan baru nampak saat anak berusia dua tahun (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2016).

*Stunting* merupakan masalah kekurangan gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya suplai zat gizi dalam waktu lama, yang menimbulkan masalah di kemudian hari, yaitu kesulitan dalam mencapai perkembangan fisik dan kognitif yang optimal. Anak *stunting* memiliki kecerdasan intelektual (IQ) lebih rendah dari rata-rata IQ anak normal (Kementerian Kesehatan Republik PT, 2018).

Berawi (2019) mengatakan bahwa *stunting* berhubungan dengan asupan nutrisi yang rendah, kualitas makanan rendah dan infeksi berulang pada masa awal kehidupan anak atau sering dikenal 1000 hari pertama kehidupan (HPK).

Infeksi berulang yang terus terjadi akan menjadi awal siklus berulang dari penyakit, gizi buruk dan imunitas yang rendah.

Secara global, *stunting* menjadi salah satu tujuan dari *Sustainable Development Goals* (SDGs). Indonesia berproses mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs ke-2 yaitu mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik, dan mendukung pertanian berkelanjutan. Target yang termasuk di dalamnya adalah penanggulangan masalah *stunting* yang diupayakan menurun pada tahun 2025. Tujuan ke-2 ini berkaitan erat dengan tujuan ke-3 yaitu memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua untuk semua usia (Nirmalasari, 2020).

Menurut Nirmalasari (2020) *Stunting* disebabkan oleh berbagai faktor yang saling mempengaruhi, bukan hanya karena faktor asupan gizi yang buruk pada ibu hamil atau balita saja. Di Indonesia, telah banyak dilakukan penelitian mengenai faktor risiko *stunting*. Risiko *stunting* dapat dimulai sejak masa konsepsi, yaitu dari faktor ibu. Ibu yang kurang memiliki pengetahuan mengenai kesehatan dan gizi sejak hamil sampai melahirkan berperan besar menimbulkan *stunting* pada anak yang dilahirkannya. Pada saat hamil, layanan *ANC-Ante Natal Care* (pelayanan kesehatan untuk ibu selama masa kehamilan), *Post Natal Care* (pelayanan kesehatan untuk ibu setelah melahirkan), dan pembelajaran dini yang berkualitas juga sangat penting. Hal ini terkait dengan konsumsi suplemen zat besi yang memadai saat hamil, pemberian ASI eksklusif dan Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MPASI) yang optimal.

## **2.5 Kerangka Pikir Penelitian**

Prevelensi *stunting* di Kabupaten Lampung Tengah cukup tinggi pada tahun 2017 yaitu 37% dengan urutan nomor 9 se-Provinsi Lampung. Pada tahun 2018, Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia membuat Strategi Nasional Percepatan Pencegahan *Stunting* 2018-2024 melalui Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) untuk dilaksanakan di tiap daerah yang salah satunya adalah Kabupaten Lampung Tengah.

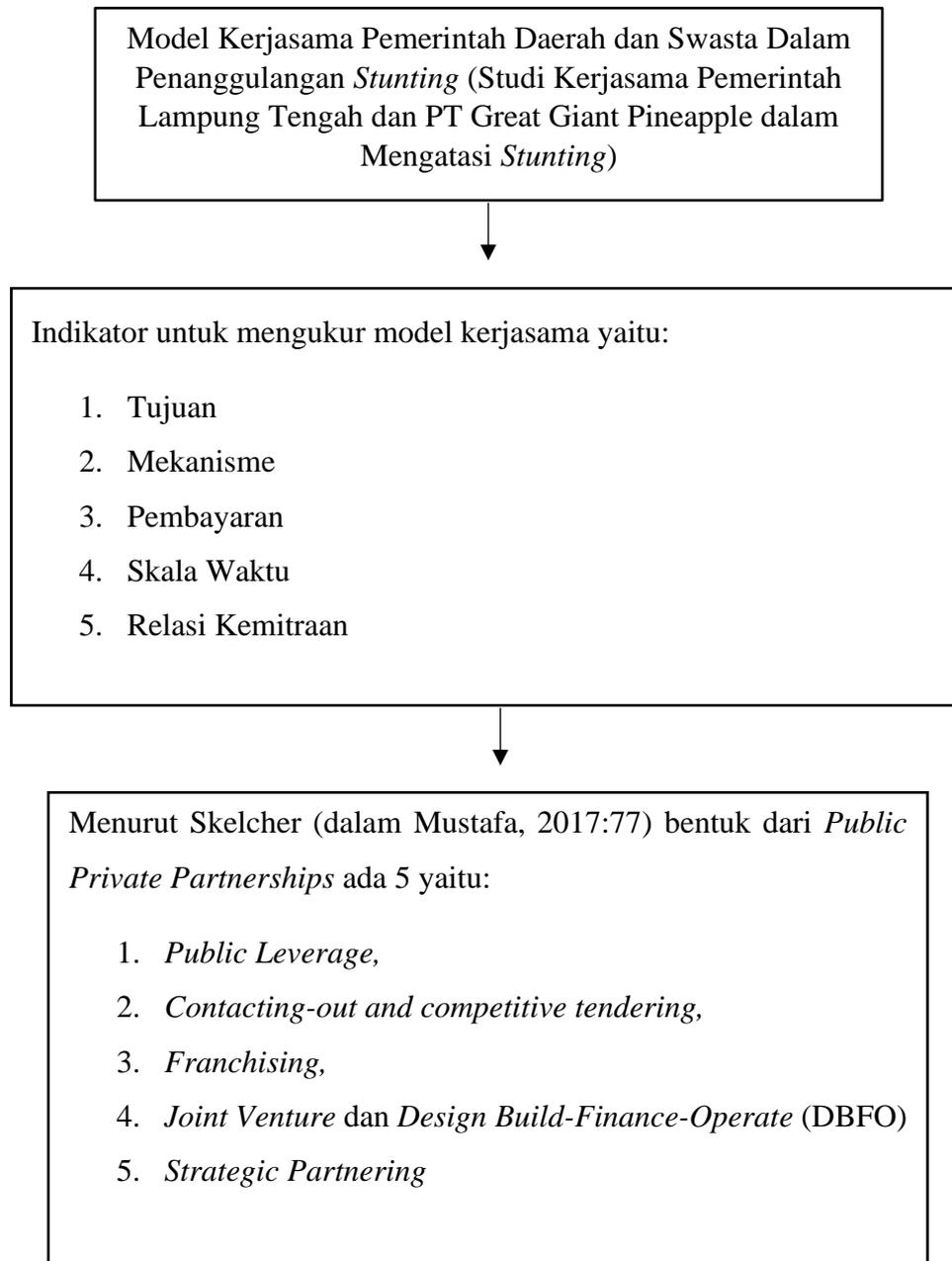
PT Great Giant Pineapple sebagai salah satu perusahaan yang memproduksi makanan berupa buah dan makanan tinggi protein seperti susu dan daging di Lampung tengah menyadari perlunya penanggulangan *stunting*. Dalam hal ini, PT Great Giant Pineapple memiliki tujuan yang sama dengan pemerintah daerah untuk pencegahan *stunting*. Dengan demikian, pemerintah dapat melakukan kerjasama dengan skema *Public Private Partnerships* (PPPs) yang merupakan suatu bentuk kerjasama antara sektor publik dan privat menjadi salah satu solusi pemerataan yang diharapkan dapat menjadi solusi atas permasalahan yang dihadapi pemerintah. Mustafa (2017:76) menyebutkan bahwa *Public-Private Partnership* menjelaskan penggabungan sumberdaya pemerintah dengan sektor swasta (lembaga *profit* ataupun *non profit*) untuk mewujudkan tujuan-tujuan masyarakat (*societal goal*).

Untuk itu, PT Great Giant Pineapple meluncurkan program Great Indonesia yaitu pemberdayaan masyarakat melalui pemberian sosialisasi dan pendampingan pencegahan *stunting* dengan menutrisi masyarakat melalui produk yang dihasilkan. Skema *Public Private Partnerships* (PPPs) memiliki beberapa model kemitraan. Menurut Skelcher (dalam Mustafa, 2017:77) model dari PPPs ada 5 yaitu *Public Leverage*, *Contacting-out and competitive tendering*, *Franchising*, *Joint Ventures*, dan *Strategic Partnering*. Gambaran singkat dari masing-masing bentuk PPPs tersebut yaitu:

1. *Public Leverage*, yaitu kemitraan yang menarik investasi sektor bisnis atau organisasi non profit untuk pengembangan bisnis dengan merealisasikan tujuan melalui birokrasi pemerintah.
2. *Contracting-Out* dan Tender Kompetitif yaitu kemitraan yang dimaksudkan untuk mengurangi pembiayaan, pencapaian, efisiensi dan peningkatan kualitas. Untuk mengurangi tanggung jawab manajemen tenaga kerja dari manajemen pemerintahan.
3. *Franchising* yaitu kemitraan yang mentransfer manajemen pemerintahan kepada sektor komersil.

4. *Joint Venture* dan *Design Build-Finance-Operate* (DBFO) yaitu kemitraan yang bertujuan untuk mengantarkan proyek-proyek di mana pemerintah memiliki kepentingan bersama dengan bisnis-bisnis untuk keperluan profit atau tidak untuk profit dengan sumber pembiayaan model ini pemerintah bersama swasta dengan kontrak jangka panjang yang telah ditentukan.
5. *Strategic Partnering* yaitu kemitraan dengan pemisahan pihak-pihak konstituen dan terdapat praktek pengorganisasian transparan yang dimaksudkan untuk menghasilkan mutual yang menguntungkan. Kemitraan ini memungkinkan pemerintah untuk memperoleh pembiayaan yang signifikan dan proses-proses bisnis yang melampaui masa waktu jangka menengah ke jangka panjang.

Berdasarkan uraian kerangka pikir di atas, maka dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.1 Kerangka pikir

(Sumber: Diolah Peneliti, 2022)

### III. METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan tipe penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini. Fuad (2014:1) mengatakan bahwa penelitian kualitatif selalu akan menggunakan logika induktif, dan penelitian kuantitatif yang menggunakan logika deduktif. Dalam penelitian kualitatif digunakan dalam berbagai disiplin ilmu yang berbeda. Penelitian ini tidak terikat disiplin keilmuan tunggal mana pun. Penelitian kualitatif merupakan bidang antar disiplin, lintas disiplin, dan kadang-kadang kontra disiplin.

Proses penelitian dimulai dengan menyusun asumsi dasar dan aturan berpikir yang akan digunakan dalam penelitian. Asumsi dan aturan berpikir kemudian diterapkan secara sistematis dalam pengumpulan dan pengolahan data untuk memberikan penjelasan dan argumentasi. Dalam penelitian kualitatif informasi yang dikumpulkan dan diolah harus tetap obyektif dan tidak dipengaruhi oleh pendapat Peneliti sendiri.

Fuad (2014: 25) menyatakan bahwa tujuan utama dalam penelitian kualitatif adalah untuk memahami makna (*meaning*) yang berada di balik fakta-fakta itu, pemahaman yang mendalam terhadap suatu fenomena sosial adalah yang terpenting. Proses berpikir dalam latar belakang adalah seperti corong atau piramida terbalik, dari yang mengenai isu-isu umum kemudian menuju pada isu-isu yang lebih khusus sampai mengkrystal terhadap objek penelitian sampai di mana menemukan suatu titik yang menjadi fokus penelitian.

Dalam penelitian ini peneliti mencoba untuk fokus menggambarkan model kerjasama antara pemerintah daerah dan swasta dalam pelaksanaan program untuk menanggulangi *stunting* di Kabupaten Lampung Tengah. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif diharapkan data yang di dapat lebih lengkap, lebih mendalam dan bermakna sehingga tujuan dari penelitian akan tercapai.

### **3.2 Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini Peneliti memilih lokasi di Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah dan BAPPEDA Kabupaten Lampung Tengah serta swasta yaitu PT Great Giant Pineapple. Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah berada kecamatan Gunung Sugih dan Terbanggi Besar. PT Great Giant Pineapple berada di Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah yang merupakan perusahaan yang menjalankan usaha di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam dalam hal ini yaitu pertanian nanas, jambu, dsb. Lokasi ini dipilih karena adanya Kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah dan PT Great Giant Pineapple.

### **3.3 Fokus Penelitian**

Fokus penelitian merupakan hal yang penting dalam penelitian kualitatif agar memudahkan Peneliti dan memilah dari lapangan yang akan sangat banyak. Fokus penelitian juga akan memberikan batas dalam studi dan pengumpulan data, sehingga Peneliti menjadi fokus memahami masalah dalam penelitiannya. Dengan fokus penelitian ini, pemilihan informan di lapangan akan langsung berkaitan dengan masalah yang di teliti, sehingga fokus dan rumusan masalah akan saling berkaitan. Pada penelitian ini Peneliti berfokus pada:

1. Model kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah dan PT Great Giant Pineapple yang dipilih berdasarkan teori *Public-Private Partnership* menurut Skelcher (dalam Mustafa, 2017:77) yaitu:

- 1) *Public Leverage*, yang dapat dilihat melalui indikator:
  - Tujuan: Untuk mencari investor
  - Mekanisme: Pemerintah menyediakan lahan dan pengembangan industri, penyediaan keuntungan-keuntungan pajak, memberikan subsidi, dll
  - Pembiayaan: Negara
  - Skala Waktu: Jangka menengah, tidak terbatas
  - Relasi kemitraan: Pemerintah mencari cara untuk mencari mitra bisnis
  
- 2) *Contracting-Out* dan Tender Kompetitif, yang dapat dilihat melalui indikator:
  - Tujuan: Mengurangi pembiayaan, pencapaian efisiensi kerja, peningkatan kualitas, dan mengurangi tanggung jawab manajemen tenaga kerja pemerintah
  - Mekanisme: Menetapkan ketentuan layanan publik melalui kontrak bisnis, lembaga non profit, atau agen pemerintah lainnya. Kadang menggunakan tender kompetitif untuk mengimbangi provider pemerintahan yang sudah ada
  - Pembiayaan: Negara
  - Skala waktu: Kontrak dengan jangka waktu yang pasti yaitu jangka pendek hingga jangka menengah
  - Relasi kemitraan: Belanja publik; swasta ataupun supplier yang tidak berorientasi profit
  
- 3) *Franchising*, yang dapat dilihat melalui indikator:
  - Tujuan: Mentransfer manajemen pemerintahan kepada sektor komersial
  - Mekanisme: Bisnis-bisnis ataupun yang tidak untuk profit diberikan lisensi oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan dalam kerangka kepentingan publik.

- Pembiayaan: Dimungkinkan mensubsidi secara tegas provisi yang tidak bersifat ekonomis tetapi dibutuhkan secara sosial. Menyediakan basis untuk mengakses pembiayaan melalui pasar.
  - Skala waktu: Menengah hingga jangka panjang.
  - Relasi kemitraan: Provisi swasta di bawah aturan pemerintah
- 4) *Joint Venture* dan *Design Build-Finance-Operate*, yang dapat dilihat melalui indikator:
- Tujuan: Mengantarkan proyek-proyek di mana pemerintah memiliki kepentingan bersama dengan bisnis-bisnis untuk keperluan profit atau *non profit*.
  - Mekanisme: Kontrak kemitraan antara pemerintah dan swasta mencakup modal-modal kerja dan biaya pelaksanaan selanjutnya
  - Pembiayaan: Swasta bersama pemerintah membiayai ulang ongkos-ongkos dalam jangka panjang
  - Skala waktu: Jangka panjang dengan jangka waktu yang telah ditentukan
  - Relasi kemitraan: Komisi pemerintahan dan spesifikasi keluaran proyek dan berkomitmen untuk membayar ulang biaya. Membiayai mitra swasta dan membangun, mengatur, mengoperasikan fasilitas
- 5) *Strategic Partnering*, yang dapat dilihat melalui indikator:
- Tujuan: Memungkinkan pemerintah untuk memperoleh pembiayaan yang signifikan dan proses-proses bisnis yang melampaui masa waktu jangka menengah ke jangka panjang
  - Mekanisme: Kemitraan jangka panjang dan tidak terbatas antara pemerintah dan aktor-aktor swasta berdasarkan kepercayaan dan kebersamaan melebihi kontrak secara formal, bahkan mungkin melingkupi elemen-elemen di luar kontrak dan *franchise* usaha bersama.
  - Pembiayaan: Pemerintah, meskipun dapat menyertakan pihak swasta

- Skala waktu: Jangka panjang. Relasi kontrak yang tidak terbatas
- Relasi kemitraan: Relasi berbasis kepercayaan, serta menjauhkan kolaborasi dari persangkaan klien dan tipu muslihat

### **3.4 Informan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan teknik sampel *purposive* yang berarti informan dipilih berdasarkan karakteristik tertentu yang dianggap memiliki kepentingan dengan fokus penelitian yang sudah ditentukan. Informan penelitian dalam penelitian ini merupakan informan yang terpercaya dengan mengetahui dan memahami mengenai model kerjasama antara pemerintah daerah dan swasta yang dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah dan PT Great Giant Pineapple. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Septice Jantika, SKM., M. Kes, Kepala Seksi Keselamatan Keluarga dan Gizi, Bidang Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan Lampung Tengah.
2. Septi Astrinasari, S. Gz, Kasubid SDM dan Kebudayaan BAPPEDA Kabupaten Lampung Tengah.
3. Indra Jaya Kesuma, *Community Development Coordinator* Great Giant Foods.
4. Nanda Syahpradana, Koordinator Program *Health Life Campaign* Great Giant Foods.
5. Agnes Tiwiyani, Amd. Keb, Bidan Desa Puskesmas Indra Putra Subing.
6. Widia, Amd. Keb, Bidan Desa Puskesmas Buyung Udik.

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Ada beberapa teknik pengambilan data yang dapat dilakukan, adapun teknik pengumpulan data yang kali ini dilakukan oleh Peneliti yaitu :

## 1. Wawancara

Wawancara merupakan metode tanya jawab yang dilakukan oleh pewawancara dengan terwawancara dalam sebuah pembicaraan. Sementara Nazir dalam Sugiyono (2019 : 138) memberikan pengertian wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara). Untuk itu dalam kali ini pewawancara mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan untuk mendapatkan data atau informasi terkait model kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah dan PT Great Giant Pineapple.

Peneliti telah melakukan turun lapangan beberapa kali untuk melakukan wawancara di lokasi yang sudah Peneliti pilih sebelumnya. Wawancara Peneliti menggunakan wawancara mendalam dan direkam dengan bantuan HP *Vivo T1 5G* dan dicatat dalam buku catatan pribadi. Berikut deskripsi wawancara turun lapangan beserta informan yang Peneliti lakukan :

Pada tanggal 04 Agustus 2022 Peneliti mewawancarai Bapak Nanda Syahpradana melalui *Whatsapp* pada pukul 11.00 WIB dengan hasil wawancara terlampir.

Pada tanggal 30 September 2022 Peneliti mewawancarai Ibu Septi Astrinasari, S. Gz, di BAPPEDA Kabupaten Lampung Tengah pada pukul 10.00 WIB dengan hasil wawancara terlampir.

Pada tanggal 30 September 2022 Peneliti mewawancarai Bapak Indra Jaya Kesuma di Great Giant Foods pada pukul 13.00 WIB dengan hasil wawancara terlampir.

Pada tanggal 07 Oktober 2022 Peneliti mewawancarai Ibu Septice Jantika, SKM., M. Kes, di Dinas Kesehatan Lampung Tengah pada pukul 10.00 WIB dengan hasil wawancara terlampir.

Pada tanggal 25 Oktober 2022 Peneliti mewawancarai Ibu Agnes, melalui telpon via *whatsapp* pada pukul 10.00 WIB dengan hasil wawancara terlampir.

Pada tanggal 26 Oktober 2022 Peneliti mewawancarai Ibu Widia, melalui telpon via *whatsapp* pada pukul 13.00 WIB dengan hasil wawancara terlampir.

Hasil wawancara ini setelah dianalisis oleh Peneliti menyatakan model kerjasama tujuan kerjasama ini yaitu berbentuk *strategic partnering* dengan tujuan untuk mendapatkan pembiayaan, mekanisme berjalannya program jangka panjang dengan kontrak tidak terbatas, pembiayaan yang ditanggung bersama, skala waktu program dengan jangka panjang dan relasi kemitraan yang berbasis kepercayaan.

## 2. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2019: 240). Dokumentasi dalam penelitian ini, dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder dan merupakan teknik bantu dalam pengumpulan data. Metode pengumpulan data dengan benda-benda tertulis seperti dokumentasi, handphone untuk keperluan recording, dan buku untuk kepentingan mencatat.

Berikut dokumen terkait hasil kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah dan PT Great Giant Pineapple dalam program Great Indonesia dalam rangka pengentasan *stunting* di Kabupaten Lampung Tengah:

- a. Dokumen GREAT INDONESIA Summary
- b. Dokumen Best Practice Program Pencegahan *Stunting* Kabupaten Lampung Tengah
- c. Dokumen *Sustainability Report Great Giant Foods 2019*

Hasilnya Peneliti dapat mengetahui dan dapat menyelesaikan skripsi dengan baik karena adanya data-data dari BAPPEDA Kabupaten Lampung Tengah,

PT Great Giant Pineapple dan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah.

### 3.6 Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2019:246) penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Bogdan dan Huberman dalam Sugiyono (2019:334) menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan meringkas data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan bahan lainnya secara sistematis sehingga mudah dipahami dan temuannya dibagikan kepada orang lain. Hal-hal yang dilakukan dalam analisis data, yaitu data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing/verification*.

#### 1. Reduksi data

Reduksi data merupakan tahap pemilihan data, menyederhanakan data yang tersedia, pengumpulan gambaran-gambaran data yang diperoleh, dan transformasi dari data-data kasar yang diperoleh dari lapangan. Reduksi data ini melakukan pemilihan tentang: bagian data yang harus di singkirkan, bagian data yang harus diberi kode dan juga menganalisis bagian-bagian data yang harus di ringkas. Jadi, dalam kegiatan ini dilakukan: pengelompokkan data, memperjelas data, pengarah data, bagian data yang tidak perlu dapat di buang, kemudian data dikelompokkan sebagai bahan menarik kesimpulan, reduksi data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah data hasil wawancara.

Dalam penelitian ini data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak untuk itu Peneliti dalam proses penelitian melakukan penyederhanaan, pemusatan data-data dari hasil penelitian wawancara di lapangan, yang bertujuan agar memudahkan penulis dalam melihat hasil penelitian wawancara dan memudahkan para pembaca melihat hasil penelitian wawancara dengan hasil yang sederhana dan akurat.

## 2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan kegiatan penyajian sekumpulan data yang di peroleh dari berbagai tahap proses penelitian yang memungkinkan Peneliti dapat menarik kesimpulan. Setelah data di reduksi selanjutnya Peneliti akan menyajikan data yang disusun secara sistematis.

Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan secara deskriptif yang mendeskripsikan model kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah dan PT Great Giant Pineapple. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dilakukan dalam bentuk Uraian Singkat, Bagan, dan sejenisnya. Ini bertujuan agar memudahkan memahami permasalahan atau fenomena yang diteliti.

## 3. Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir dalam Teknik analisis data adalah penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan ini mengacu pada hasil penelitian. Dalam penelitian ini Peneliti akan menyimpulkan model kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah dan PT Great Giant Pineapple berdasarkan indikator bentuk kerjasama *Public Private Partnerships* yaitu tujuan, mekanisme, pembiayaan, sklaa waktu, dan relasi kemitraan. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini berdasarkan hasil penelitian.

Dalam hal ini, Peneliti menarik kesimpulan yang mampu menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal yaitu yang berkaitan dengan model kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah dan PT Great Giant Pineapple.

### 3.7 Teknik Keabsahan Data

#### 1. Uji Validitas

Validitas dalam penelitian kualitatif didasarkan pada kepastian apakah hasil penelitian sudah akurat dari sudut pandang peneliti, partisipasi, atau pembaca secara umum, istilah validitas dalam penelitian kualitatif dapat

disebut pula dengan *trustworthiness*, *authenticity*, dan *credibility*. Creswell (dalam Susanto, 2013). Dalam penelitian ini, uji validitas yang digunakan adalah triangulasi data. Triangulasi (Moleong, 2014) yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data dengan melakukan pengecekan atau perbandingan terhadap data yang diperoleh dengan sumber atau kriteria yang lain diluar data itu, untuk meningkatkan keabsahan data. Pada penelitian ini, triangulasi yang dilakukan adalah:

- 1) Triangulasi sumber, yaitu dengan cara membandingkan apa yang dikatakan oleh subyek dengan dikatakan informan dengan maksud agar data yang diperoleh dapat dipercaya karena tidak hanyadiperoleh dari satu sumber saja yaitu subyek penelitian, tetapi data juga diperoleh dari beberapa sumber lain seperti tetangga atau teman subyek.
- 2) Triangulasi metode, yaitu dengan cara membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara dan membandingkan data hasil pengamatan data hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan. Dalam hal ini peneliti berusaha mengecek kembali data yang diperoleh melalui wawancara

## **IV. GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN**

### **4.1 Gambaran Umum Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah**

#### **4.1.1 Sejarah Singkat Dinas Kesehatan Lampung Tengah**

Kabupaten Lampung Tengah merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Lampung. Sejak diundangkannya Undang Undang Nomor 12 Tahun 1999, Kabupaten Lampung Tengah mengalami pemekaran menjadi dua kabupaten dan satu kota yaitu Kabupaten Lampung Tengah sendiri, Kabupaten Lampung Timur dan Kota Metro. Ibukota Lampung Tengah yang semula berada di Kota Metro, pada tanggal 1 Juli 1999 dipindahkan ke Kota Gunung Sugih. Kegiatan pemerintahan dengan skala kabupaten dipusatkan di Gunung Sugih, sedangkan kegiatan perdagangan dan jasa dipusatkan di Bandar Jaya.

Salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang berada di bawah Kabupaten Lampung Tengah adalah Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan Lampung Tengah beralamatkan di JL. Lintas Sumatera, RT. 6 RW. 3, Terbanggi Agung, Kec. Gunung. Sugih, Kabupaten Lampung Tengah.

#### 4.1.2 Visi Misi Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah

**Visi:**

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah periode 2021-2026 adalah "Mewujudkan Rakyat Lampung Tengah Berjaya".

Visi Dinas Kesehatan Lampung Tengah berdasarkan visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Kesehatan Berjaya.

Kesehatan berjaya menunjukkan kehadiran dan kemampuan pemerintah bersama-sama dengan masyarakat dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkarakter, unggul, berbudaya, serta sehat jasmani dan rohani.

**Misi:**

Dalam rangka mewujudkan Visi dan makna "berjaya", ditetapkan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026, yaitu :

1. Misi ke-1 : Meningkatkan taraf kesehatan, pendidikan, dan kehidupan sosial budaya masyarakat (Indeks Pembangunan Manusia untuk Kesejahteraan Masyarakat).
2. Misi ke-2 : Meningkatkan kualitas infrastruktur yang berwawasan lingkungan guna efektivitas pergerakan manusia, barang dan jasa (Percepatan Infrastruktur).
3. Misi ke-3 : Meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan produksi pertanian dan perkuatan kesehatan pangan stabilitas harga jual hasil tani guna menekan angka kemiskinan (Petani Berjaya).
4. Misi ke-4 : Menciptakan kondisi masyarakat yang tertib, aman, damai serta kondusif guna peningkatan investasi daerah (Stabilitas Keamanan).

5. Misi ke-5 : Meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Dari uraian misi Bupati Kabupaten Lampung Tengah, terlihat bahwa Dinas Kesehatan diberi amanat untuk melaksanakan misi ke-1. Tujuan yang akan dicapai dalam mewujudkan Misi ke-satu kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih di bidang kesehatan adalah “Kesehatan Berjaya”, terwujud dengan meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat yang berkualitas, termasuk pelayanan kesehatan di kampung dan peningkatan peran serta kader Kesehatan.

#### **4.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah**

Berdasarkan Perda Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah dan Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah bahwa Tugas Pokok Dinas Kesehatan adalah melaksanakan sebagian kewenangan daerah di bidang Kesehatan.

Sedangkan fungsi Dinas Kesehatan adalah menyelenggarakan kegiatan, dalam bidang sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis, pengembangan, perencanaan dan operasional teknis di bidang kesehatan
2. Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kesehatan
3. Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, integrasi dan advokasi lintas sektor
4. Pemberian rekomendasi perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugas
5. Pembinaan terhadap UPT Dinas

Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah memiliki beberapa bagian-bagian yang memiliki tupoksi sebagai berikut:

#### A. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan dan pengelolaan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan serta Pembinaan Pengembangan SDM Kesehatan. Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan bahan pembinaan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi pengelolaan administrasi rumah tangga dinas, hukum, hubungan masyarakat, tata laksana, dan peraturan perundang-undangan;
- b. Penyelenggaraan bahan pembinaan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi pengelolaan administrasi keuangan dan aset atau barang milik daerah;
- c. Penyelenggaraan bahan pembinaan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM kesehatan;
- d. Penyelenggaraan laporan pelaksanaan kegiatan pada Sekretariat;
- e. Penyelenggaraan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

#### B. Kesehatan Masyarakat

Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan masyarakat. Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
- c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan keluarga, gizi, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga, gizi, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
- e. Penyelenggaraan tugas-tugas yang belum dapat dilaksanakan UPTD;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

### C. Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Surveilans dan Imunisasi, Pencegahan dan pengendalian Penyakit Menular, dan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang Surveilans dan Imunisasi, Pencegahan dan Pengendalian

- Penyakit Menular, dan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Surveilans dan Imunisasi, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, dan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa;
  - c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Surveilans dan Imunisasi, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, dan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa;
  - d. Pemantauan evaluasi, dan pelaporan di bidang *Surveilans* dan Imunisasi, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, dan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa;
  - e. Penyelenggaraan tugas-tugas yang belum dapat dilaksanakan oleh UPTD Puskesmas;
  - f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### D. Pelayanan Kesehatan

Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional dan Pelayanan Kesehatan Rujukan. Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional, Pelayanan Kesehatan Rujukan, dan Kefarmasian;

- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional, Pelayanan Kesehatan Rujukan, dan Kefarmasian;
- c. Penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi, di bidang Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional, Pelayanan Kesehatan Rujukan, dan Kefarmasian;
- d. Pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional, Pelayanan Kesehatan Rujukan, dan Kefarmasian;
- e. Penyelenggaraan tugas-tugas yang belum dapat dilaksanakan oleh UPTD Puskesmas;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### E. Sumber Daya Kesehatan

Bidang Sumberdaya Kesehatan mempunyai tugas Pengamanan dan pengendalian sediaan farmasi, makanan minuman, Sumberdaya Manusia, Alat Kesehatan dan perbekalan kesehatan.

- a. Bidang Sumberdaya Kesehatan dipimpin oleh Kepala Bidang
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana ayat (1) bidang Sumberdaya Kesehatan mempunyai fungsi:
  - 1. Melaksanakan tugas pokok dan fungsi penyediaan Sumberdaya Manusia, pengelolaan obat dan Bahan Habis Pakai pelayanan kesehatan dasar dan upaya kesehatan masyarakat, Alat Kesehatan dan Penunjang Medis.
  - 2. Melaksanakan tugas pokok dan fungsi peningkatan dan pembinaan Sumberdaya Manusia, Kefarmasian

dan Alat Kesehatan dan Penunjang Medis di sarana produksi dan distribusi

3. Melaksanakan tugas pokok dan fungsi penyediaan dan pengelolaan alat kesehatan, reagensia dan vaksin pelayanan kesehatan dasar dan upaya kesehatan masyarakat dan perorangan, sertifikasi alat kesehatan, PKRT Kelas 1, dan industri rumah tangga perbekalan kesehatan.
4. Melaksanakan tugas pokok dan fungsi pemberian izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan, rekomendasi izin cabang PAK, rekomendasi izin PBF, rekomendasi izin Industri Kecil Obat Tradisional, rekomendasi izin Industri Rumah Tangga Perbekalan Kesehatan, dan sertifikasi produk Industri Rumah Tangga pangan laik konsumsi.
5. Melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasan, pembinaan dan peningkatan Sumberdaya Manusia untuk peningkatan kualitas dan kuantitas Sumberdaya Manusia di Bidang Kesehatan.
6. Menyusun perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pelaporan pencapaian kinerja tugas pokok dan fungsi Bidang Sumberdaya Kesehatan.
7. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi seluruh Kepala Seksi dan unit kerja, advokasi dan koordinasi lintas sektor dan lintas program terkait untuk peningkatan kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Sumberdaya Kesehatan.
8. Memberikan laporan, saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas agar dalam pengambilan keputusan oleh Kepala Dinas dalam hal pelaksanaan tugas-tugas Bidang Sumberdaya Kesehatan sesuai dengan standar

- pelayanan minimal, prosedur, mekanisme dan tujuan yang ditetapkan.
9. Mendistribusikan tugas pada bawahan, dengan mendelegasikan tugas, wewenang dan tanggung jawab pelaksanaan program Bidang Sumberdaya Kesehatan agar tugas terbagi habis sesuai dengan tugas dan beban kerja.
  10. Melakukan penilaian atas kinerja staf bidang Sumberdaya Kesehatan.
  11. Menyusun pelaporan dan evaluasi kinerja Bidang Sumberdaya Kesehatan sebagai bahan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dinas Kesehatan
  12. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan.

## **4.2 Gambaran Umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Tengah**

### **4.2.1 Sejarah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Tengah**

Bappeda Lampung Tengah di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 1999 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja badan perencana pembangunan daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan Kawat Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 061.2/2121/SJ perihal Persetujuan Peningkatan Type Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Tengah dari B menjadi Type A maka dipandang perlu diadakan penataan kembali Organisasi dan Tata Kerja Bappeda Kabupaten Lampung Tengah;

bahwa penataan organisasi dan tata kerja Bappeda dimaksud perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pembentukan BAPPEDA Republik Indonesia ditetapkan dengan keputusan Presiden Republik Indonesia No. 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan BAPPEDA R.I yang mana Bappeda mempunyai dua tingkat kedudukan. Yang Pertama, Bappeda tingkat I (Pemerintahan Provinsi) dan Bappeda Tingkat II (Pemerintahan Kabupaten/Kota) BAPPEDA merupakan singkatan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang mana Badan ini menurut aturan KEPRES No. 27 Tahun 1980, dalam Bab I bahwa badan ini adalah Badan Staf yang langsung dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah. Bappeda berperan sebagai pembantu kepala daerah dalam menentukan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan Daerah. Untuk menyempurnakan peraturan daerah khususnya dalam implementasi pembangunan daerah yang merata berdasarkan prinsip otonomi yang seluas luas maka Pemerintahan mengeluarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mana dalam Pasal 23 di tegaskan sebagai berikut: “Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Daerah Provinsi, Kabupaten, atau Kota adalah kepala badan perencanaan pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut kepala Bappeda”.

#### **4.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Tengah**

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah No 88 Tahun 2016, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam menyusun dan menentukan kebijakan di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah serta penilaian atas pelaksanaannya, untuk menyelenggarakan tugas tersebut maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi :

1. Menyusun Rencana Pembangunan Daerah yang terdiri atas pola umum pembangunan Lima Tahun Daerah.
2. Menyusun rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah Kabupaten;
3. Menyusun Program-program tahunan sebagaimana pelaksanaan Rencana-rencana dalam pembangunan Lima Tahun Daerah yang dibiayai daerah sendiri ataupun yang disusulkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung;
4. Melaksanakan Koordinasi Perencanaan diantara Dinas-dinas satuan organisasi lain dalam lingkungan pemerintah daerah, instansi-instansi vertikal, kecamatan-kecamatan dan badan-badan lain yang berada dalam wilayah daerah;
5. Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pembangunan kabupaten bersama-sama dengan bagian keuangan dengan koordinsi sekretaris daerah/wilayah;
6. Melaksanakan koordinasi atau mengadakan penelitian untuk kepentingan perencanaan pembangunan daerah;
7. Mengikuti Persiapan dan perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan didaerah untuk perencanaan penyempurnaan lebih lanjut;
8. Memonitor Pelaksanaan Pembangunan Didaerah
9. Melakukan kegiatan lain dalam rangka perencanaan sesuai dengan petunjuk kepala daerah;

#### **4.2.3 Visi dan Misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Tengah**

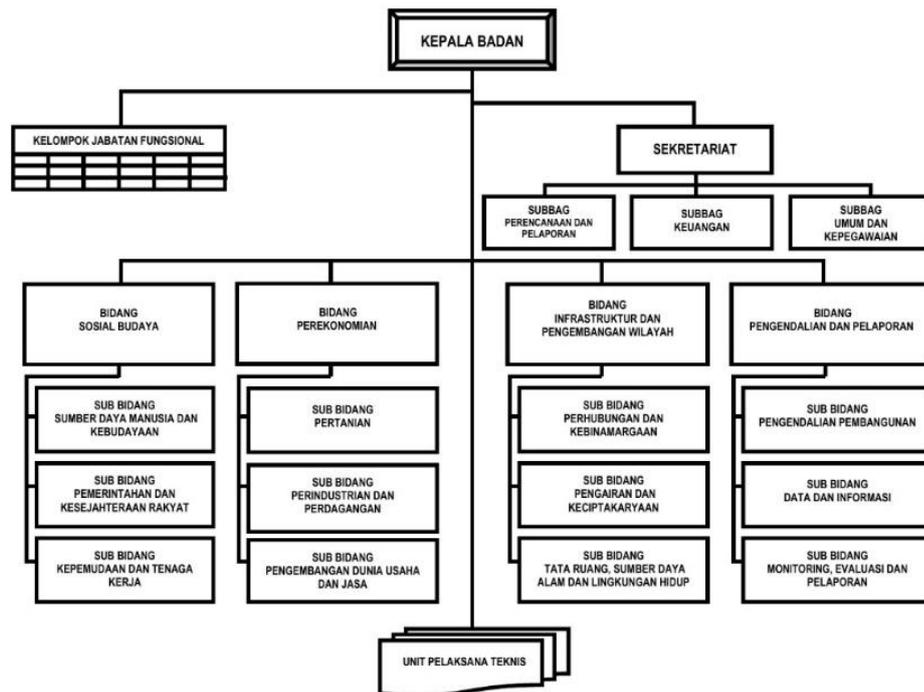
##### **Visi:**

(Sesuai dengan Perda Kabupaten Lampung Tengah Nomor 07 Tahun 2016 tentang RPJMD 2016-2021) Visi Kabupaten Lampung Tengah adalah : " Lampung Tengah Sebagai Lumbung Pangan Yang Aman, Maju, Sejahtera dan Berkeadilan.

### Misi:

Bappeda Kabupaten Lampung Tengah melaksanakan Misi ke- 6, yaitu: "Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Pro Rakyat".

#### 4.2.4 Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Tengah



Gambar 4.1 Struktur Organisasi BAPPEDA Kabupaten Lampung Tengah

(Sumber: Website Resmi BAPPEDA Kabupaten Lampung Tengah)

### 4.3 Gambaran Umum PT Great Giant Pineapple

#### 4.3.1 Sejarah PT Great Giant Pineapple

PT Great Giant Pineapple atau yang disingkat sebagai GGP merupakan perusahaan berbentuk perseroan yang berdiri sejak tanggal 14 Mei 1979 dan berlokasi di Jalan Raya Manggala KM 77, Terbanggi Besar, Lampung Tengah. Awal mula kegiatan usaha PT Great Giant Pineapple dipelopori oleh PT Umas Jaya Farm yang berdiri sejak tahun 1973 dengan dipelopori oleh 20 orang perintis. PT Umas Jaya

Farm sendiri merupakan perusahaan yang bergerak dalam usaha tanaman singkong dan pabrik pembuatan tepung tapioka di Terbanggi Besar, Lampung Tengah. PT Umas Jaya Farm telah berhasil melakukan terobosan dalam pembangunan pabrik untuk pengolahan tepung singkong dengan luas lahan sekitar 1000 ha. Sekarang, produksi tepung singkong tersebut telah berhenti dan penggunaan lahan telah diganti untuk menanam nanas (Insan, 2020). PT Great Giant Pineapple dinyatakan resmi berdiri dengan fasilitas Penanaman Modal Dalam Negri (PMDN). Pada tanggal 21 Juli 1980 dibuat surat perjanjian tetap (SPT) No.102BPKPM/5/PMDM tentang berdirinya PT Great Giant Pineapple co dengan status tanah yang digunakan adalah Hak Guna Usaha (HGU) dengan luas tanah 9.118 ha dalam jangka waktu 20 tahun dan dapat diperpanjang apabila perusahaan mampu memanfaatkan sumber daya dengan baik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar perusahaan. Sekarang ini PT Great Giant Pineapple memiliki luas lahan sekitar 30,000 ha di Lampung, dimana 19,000 ha didedikasikan untuk menanam nanas smooth cayenne. PT Great Giant Pineapple juga telah memiliki perkebunan nanas dan fasilitas pengolahan nanas terbesar didunia.

#### **4.3.2 Visi, Strategi dan Nilai PT Great Giant Pineapple**

Adapun visi strategi nilai yang di miliki oleh PT Great Giant Pineapple adalah sebagai berikut:

##### **Visi:**

Menjadi mitra pilihan dan terpercaya dalam buah olahan yang bermutu di seluruh dunia

##### **Strategi:**

- a. Pertumbuhan:
  - i. Diverifikasi produk
  - ii. Diverifikasi cara pemasukan nanas

- iii. Product and service yang komplementer serta sinergi yang optimal.
- iv. Ekspansi perdagangan
- b. Effisiensi:
  - i. Yield tinggi dan biaya rendah
  - ii. Perkembangan yang berkesinambungan
- c. Sistem dan struktur:
  - i. Pengembangan bakat
  - ii. Manajemen performa dan akuntabilitas
  - iii. Kultur organisasi yang kuat
- d. Prioritas Budaya:
  - i. Bertindak sebagai satu perusahaan
  - ii. Mencapai target yang matang
  - iii. Berpacu dengan waktu sesuai kepentingan
  - iv. Perbaikan yang terus menerus
  - v. Inovasi dan fokus kepada konsumen dan produk.

**Nilai perusahaan:**

*a. Teamwork*

Kami saling membantu dan memberi dukungan. Kami membangun iklim kepercayaan, ketergantungan dan kerjasama antar pekerja kami. Kami menjaga komunikasi timbal balik dan terbuka antar pekerja mengenai operasional kerja. Kami menyediakan informasi yang jelas, tepat waktu dan akurat mengenai operasioanal kerja bagi pekerja disemua level. Kami akan memberikan informasi bagi yang memerlukan.

*b. Perbaikan yang Berkelanjutan*

Kami secara terus menerus mengembangkan cara pengolahan, produk dan pelayanan, dan mencoba cara baru dalam melaksanakan kerja. Kami mendorong kreativitas dalam menciptakan solusi baru penyelesaian suatu masalah. Kami

menghargai siapa saja yang memiliki inisiatif dalam penyelesaian masalah, mengembangkan kinerja proses dan produk, dan melakukan pekerjaan diluar tanggung jawab demi mencapai hasil maksimal.

c. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kami meningkatkan efektifitas individu dengan menyelenggarakan *training*, pelatihan, dan pengembangan kesempatan. Kami mendorong pembelajaran berkelanjutan dengan sistem fasilitas yang akan memungkinkan pekerja menginteraksian pengetahuan dan kemampuan barunya dalam pekerjaan.

d. Fokus Pada Pelanggan

Kami mengerti kebutuhan pelanggan dan menjamin kepuasan pelanggan. Kami memproduksi produk dan pelayanan yang sesuai keinginan pelanggan. Kami secara terus menerus mencari cara baru untuk menyediakan total solusi bagi pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan.

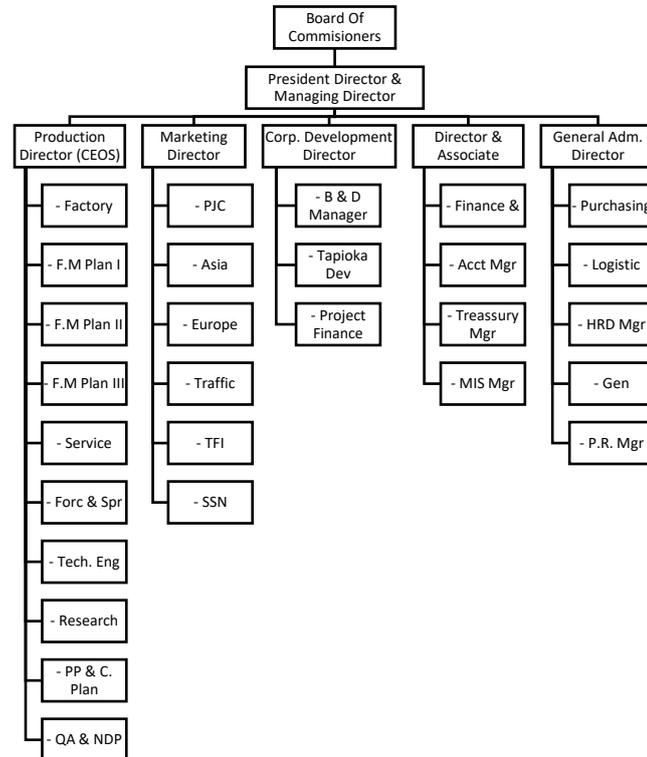
e. Tanggung Jawab

Kami berjanji memberikan suatu nilai yang terbaik bagi semua pihak terkait. Kami menjelaskan tujuan dan tanggung jawab mengenai fungsi dan proses pada setiap pekerja serta mengukur kemampuan mereka. Kami mempercayakan kepada pekerja kami tugas-pekerjaan untuk menciptakan rasa memiliki. Kami bertanggung jawab atas segala tindakan, keputusan dan akibatnya.

f. Kesadaran Pada Sumber Daya dan Biaya

Kami menggunakan sumber biaya atau asset secara bijaksana dan menghindari pemborosan. Kami mengurangi biaya dengan menjaga dan mengembangkan efektifitas serta kualitas. Kami menghargai siapa saja yang mencari dan melaksanakan cara meniadakan pemborosan dan menggantikan kegiatan/proses yang tidak bernilai menjadi bernilai.

### 4.3.3 Struktur Organisasi PT Great Giant Pineapple



Gambar 4.2 Struktur Organisasi PT Great Giant Pineapple

(Sumber: PT Great Giant Pineapple)

Keterangan:

Acc	= Accounting
B & D	= Business & Development
TFI	= Transpacifik Incorporation
CEQS	= Chief Executive Quality System
SSN	= Sewu Segar Nusantara
Mgr	= Manager
HRD	= Human Research & Development
PP & C	= <i>Production Planning &amp; Controlle</i>
TechEng	= <i>Technical Engineering</i>
PIR	= Perusahaan Inti Rakyat
MIS	= <i>Management Information System</i>
QA & NPD	= <i>Quality Assurance &amp; New Development Product</i>

Dalam struktur organisasi PT Great Giant Pineapple, yang memegang kekuasaan tertinggi adalah Dewan Komisaris (*Board of Comissioners*), sedangkan dalam menjalankan kekuasaan dilakukan oleh Dewan Direksi yang terdiri dari Presiden Direktur yang dibantu oleh Direktur Manajemen. Kemudian Dewan Direksi dibawah oleh Direktur Produksi, Direksi Marketing, Direktur pengembangan Korporasi, Direktur Keuangan, dan Direktur Administrasi Umum.

#### **4.4 Gambaran Umum Program Great Indonesia**

Great Indonesia adalah program berbasis masyarakat untuk gizi intervensi di masyarakat sebagai akselerator untuk pencegahan *Stunting* dan Obesitas. Kami bersemangat untuk berkolaborasi dalam menciptakan masa depan yang lebih sehat dan lebih baik generasi

Adapun misi dalam program Great Indonesia yang merupakan kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah dan PT Great Giant Pineapple yaitu “Menuju Generasi Bangsa yang Lebih Sehat, Lebih Cerdas dan Lebih Unggul”.

##### **4.4.1 Pihak yang Terlibat dalam Kerjasama Program Great Indonesia**

Program ini merupakan kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah dan PT Great Giant Pineapple yang diluncurkan pada 17 Juli 2022 di *Training Center Great Giant Foods* di Terbanggi Besar. Acara ini dihadiri oleh beberapa pemangku kepentingan antara lain Dinas Kesehatan Provinsi, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah bahkan Perwakilan Kementerian Kesehatan yang membuat komitmen bersama dalam pencegahan *stunting*.



Gambar 4.3 Pernyataan Komitmen Pelaksanaan Percepatan Pencegahan *Stunting* oleh TNP2K dan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah



Gambar 4.4 Dokumentasi Penandatanganan Komitmen Kerjasama dalam penanganan isu *stunting* oleh PT Great Giant Foods, Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi dan BAPPEDA Kabupaten Lampung Tengah

(Sumber: *Best Practice Stunting Kabuptaen Lampung Tengah, 2019*)

Langkah selanjutnya sebelum implementasi program, PT Great Giant Pineapple dan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah mengadakan *training of trainee* untuk kader desa. 22 Kader Desa berperan untuk menyampaikan seluruh Program kepada masyarakat. Kader program dipilih untuk menjadi perpanjangan program di masing-masing lokus yang telah ditunjuk. Kader terdiri dari Guru PAUD, Bidan Desa, Kepala Desa Dalam proses pelatihan ini PT Great Giant Pineapple bekerjasama dengan Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan dan PMK untuk memberikan beberapa materi pelatihan kepada masyarakat.

#### **4.4.2 Implementasi Program Great Indonesia**

Program Great Indonesia ini memiliki tiga fokus kegiatan yaitu pola makan, pola asuh, dan sanitasi KRPL.

##### **a. Pola Makan**

Tujuannya adalah menjaga pertumbuhan anak dan merubah gaya hidup anak menjadi lebih sehat sejak dini.

Target : Anak Usia Dini

Lokus : PAUD

*Beneficiary* : 700 Anak

##### **b. Pola Asuh**

Program pemberian pengayaan, pembelajaran dan sosialisasi mengenai kebutuhan gizi dan cara asuh anak serta balita.

Target : Ibu Hamil, Ibu Menyusui, Balita

Lokus : Posyandu

*Beneficiary* : 2.100 orang

c. Sanitasi & KRPL

Program pemberdayaan pekarangan untuk mendekatkan akses gizi masyarakat dan sosialisasi mengenai sanitasi berbasis masyarakat.

Target : KWT dan Masyarakat Desa

Lokus : Arisan, Kumpulan KWT dll

Beneficiary : 200 Kepala Keluarga

#### 4.4.3 Tanggung Jawab Pemerintah

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menentukan daerah mana yang merupakan lokasi dengan angka *stunting* yang tinggi sehingga perlu dilaksanakan program pencegahan lebih intensif. Dalam surat Keputusan Bupati Lampung Tengah pada tahun 2019 terdapat 30 kampung yang ditetapkan sebagai lokasi *stunting* di Kabupaten Lampung Tengah, yaitu:

Lampiran : Keputusan Bupati Lampung Tengah  
Nomor : /KPTS/B.a.VII.01/2019  
Tanggal : 2019

---

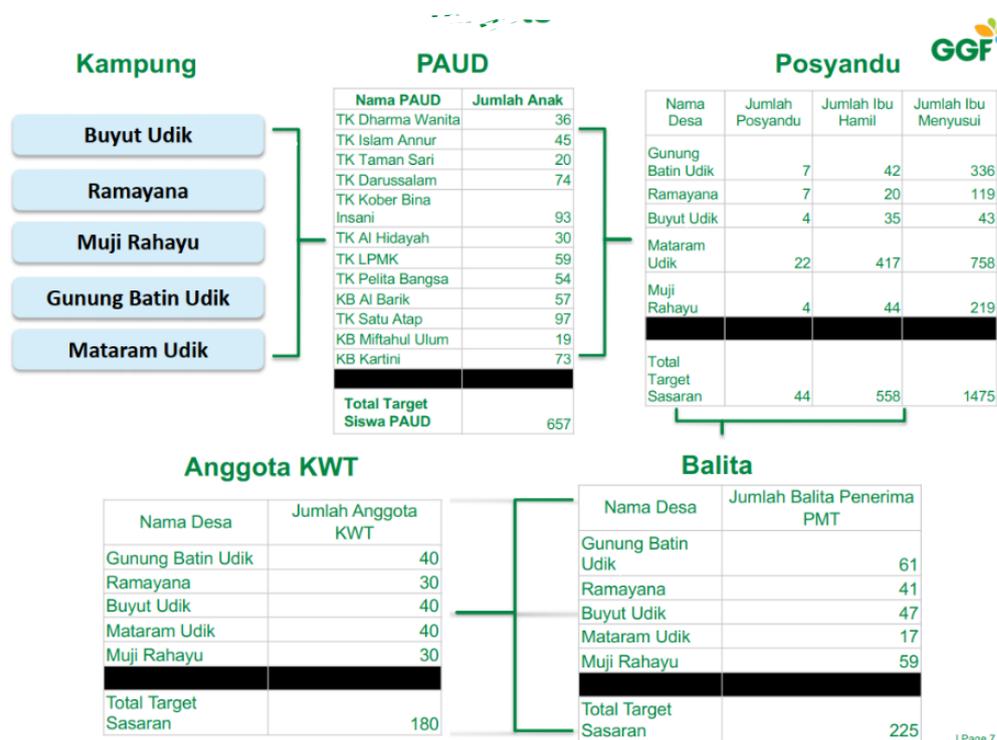
Penetapan Lokasi Stunting Di Kabupaten Lampung Tengah  
Tahun 2019

No	Kampung	Kecamatan
1	Tawang Negeri	Pubian
2	Payung Dadi	Pubian
3	Padang Rejo	Pubian
4	Gunung Agung	Anak Tuha
5	Negara Bumi Ilir	Anak Tuha
6	Sri Katon	Anak Tuha
7	Harapan Rejo	Seputih Agung
8	Mujirahayu	Seputih Agung
9	Rama Gunawan	Seputih Raman
10	Rama Dewa	Seputih Raman
11	Rukti Endah	Seputih Raman
12	Ruktiharjo	Seputih Raman
13	Rama Kelardungan	Seputih Raman
14	Rama Indera	Seputih Raman
15	Ramayana	Seputih Raman
16	Rejo Basuki	Seputih Raman
17	Ratna Khaton	Seputih Raman
18	Pujo Basuki	Trimurjo
19	Notoharjo	Trimurjo
20	Pujoasri	Trimurjo
21	Tukung Kakan	Bumi Ratu Nuban
22	Tanjung Rejo	Pubian
23	Buyut Udik	Gunung Rapih
24	Gedung Ratu	Anak Ratu Aji
25	Gunung Batin Udik	Gunung Rapih
26	Cabang	Bandar Surabaya
27	Mataram Udik	Bandar Mataram
28	Bandar PutihTua	Anak Ratu Aji
29	Mataram Ilir	Seputih Surabaya
30	Riau Periang	Pubia

**Lokus Program  
Great Indonesia  
GGF**

**BUPATI LAMPUNG TENGAH**  
  
**LOEKMAN DJOYOSOEMARTO**

Gambar 4.5 Penentuan Lokasi Program Great Indonesia Tahun 2019



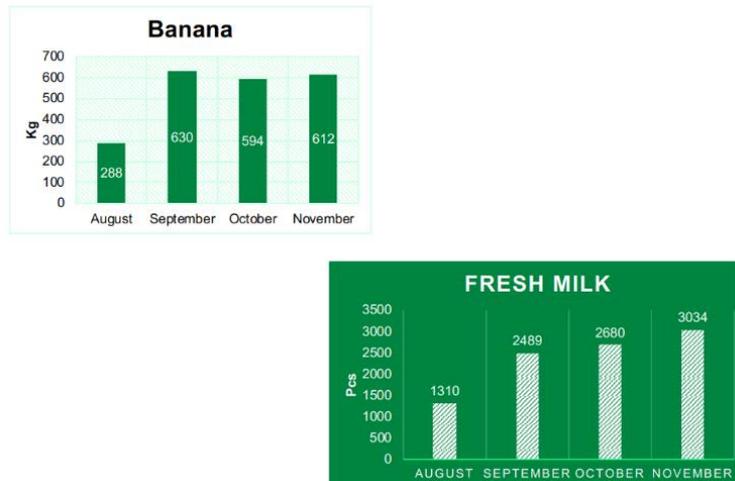
Gambar 4.6 Lokasi Pelaksanaan Program Great Indonesia Tahun 2019

(Sumber: Great Indonesia GGF Summary)

#### 4.4.4 Tanggung Jawab PT Great Giant Pineapple

PT Great Giant Pineapple bertanggung jawab untuk memberikan natura kepada masyarakat. Natura dalam KBBI merupakan barang yang sebenarnya dan bukan dalam bentuk uang. Dalam program Great Indonesia, PT Great Giant Pineapple diakumulasikan telah membagikan natura kepada masyarakat sebanyak 3-ton buah pisang dan 3.800 pcs susu segar. Rincian yang sudah dibagikan adalah:

- Bulan agustus : 288 pisang dan 1310 susu.
- Bulan september : 630 pisang dan 2489 susu.
- Bulan oktober : 594 pisang dan 2680 susu.
- Bulan november : 612 pisang dan 3034 susu.



Gambar 4.7 Pendistribusian Pisang dan Susu Segar

(Sumber: Great Indonesia GGF Summary)

#### 4.4.5 Pelaksanaan Program Great Indonesia 2019

Dalam program Great Indonesia, sudah banyak kegiatan yang dilakukan seperti membagikan buah dan susu, sosialisasi sampai melakukan praktik hidup sehat. Berikut data *breakdown* kegiatan Great Indonesia selama tahun 2019 dan foto pelaksanaan program:

Program	Aug				Sep			
	5 - 10	12-17	19-24	26 - 31	2 - 7	9 - 14	16 - 21	23 - 28
Pola Makan	Pemberian Susu	Pemberian Susu	Pemberian Susu	Pemberian Susu	Pemberian Susu	Pemberian Susu	Pemberian Susu	Pemberian Susu
	Pemberian Pisang	Pemberian Pisang	Pemberian Pisang	Pemberian Pisang	Pemberian Pisang	Pemberian Pisang	Pemberian Pisang	Pemberian Pisang
	Pengenalan tentang pentingnya aktivitas fisik	Praktik aktivitas fisik ringan		pengenalan tentang penyakit yang berakibat apabila tidak menerapkan gaya hidup sehat	pengenalan tentang gizi berimbang kepada orangtua murid		Praktik aktivitas fisik ringan	Praktek CTPS
	pengenalan tentang pentingnya sarapan	murid sudah diwajibkan membawa minum dan bekal sendiri	pengenalan jenis - jenis makanan sehat dan tidak sehat	Pemberian pengetahuan apa itu susu dan bagaimana susu yang baik untuk anak2	pengenalan buah buahan sehat	Pengenalan tentang budaya cuci tangan pakai sabun (CTPS)	pembelajaran dengan praktik langsung CTPS	Pengenalan tentang pentingnya minum air putih setiap hari
Pola Asuh	Sosialisasi tentang pentingnya gizi berimbang untuk ibu hamil				Sosialisasi tentang pentingnya ASI/Promosi dan Konseling Menyusui			
	Sosialisasi penggunaan pisang sebagai MPASI				pemberian Pisang untuk MPASI pada Balita			
Sanitasi	-				-			

Gambar 4.8 Breakdown Program Great Indonesia Tahun 2019

Program	Oct			
	30 - 5	7 - 12	14 - 19	21 - 26
Pola Makan	Pemberian Susu	Pemberian Susu	Pemberian Susu	Pemberian Susu
	Pemberian Pisang	Pemberian Pisang	Pemberian Pisang	Pemberian Pisang
	Praktik aktivitas fisik ringan	Praktik CTPS	Praktik aktivitas fisik ringan	pemberian pengayaan orangtua tentang wadah air minum tidak sekali pakai
	pemberian pengayaan orangtua tentang sarapan yang baik	praktek membersihkan lingkungan sekolah	fun games gimification untuk belajar hidup sehat	membawa minum atau makanan dalam bekal yang tidak hanya sekali pakai
Pola Asuh	Pengenalan tentang 1000 Hari Pertama Kehidupan			
	pemberian susu untuk Ibu hamil			
	pemberian Pisang untuk MPASI pada Balita			
Sanitasi	pengenalan program Great Indonesia, Stunting dan KRPL (Kawasan Rumah Pangan Lestari) inisiasi program KRPL pada masyarakat			

Gambar 4.9 Breakdown Program Great Indonesia Tahun 2019

Program	Nov				Dec			
	4 - 9	11 - 16	18 - 23	25 - 30	2 - 7	9 - 14	16 - 21	23 - 28
Pola Makan	Pemberian Susu	Pemberian Susu	Pemberian Susu	Pemberian Susu	Pemberian Susu	Pemberian Susu	Pemberian Susu	Pemberian Susu
	Pemberian Buah Pisang Gratis	Pemberian Buah Pisang Gratis	Pemberian Buah Pisang Gratis	Pemberian Buah Pisang Gratis	Pemberian Buah Pisang Gratis	Pemberian Buah Pisang Gratis	Pemberian Buah Pisang Gratis	Pemberian Buah Pisang Gratis
		Praktik aktivitas fisik ringan		Praktik aktivitas fisik ringan	kegiatan mengukur berat dan tinggi badan	Jalan bersama keiling desa	Praktik aktivitas fisik ringan	
	Penanaman tanaman untuk sekolah	Pengenalan program lingkungan bersih sekolah kepada orangtua	pengenalan proses buah dari petani sampai dapat dikonsumsi oleh anak2	pengenalan susu perah dari sapi sampai dapat dikonsumsi oleh anak2	Tugas menggambar petani atau perah susu sapi untuk dilombakan di sekolah	Evaluasi anak2 tentang pengetahuan makanan sehat dengan gimification ada game untuk test nya	pembelajaran tentang berat badan ideal untuk anak - anak	Mid Program Evaluation
Pola Asuh	Konseling bagi para pengasuh balita yang ada dirumah selain orangtua				konseling untuk millenial dengan gimmification dan minum susu bersama			
	pemberian susu untuk Ibu hamil				pemberian susu untuk Ibu hamil			
	pemberian Pisang untuk MPASI pada Balita				pemberian Pisang untuk MPASI pada Balita			
Sanitasi	Inisiasi dan pelatihan bagi masyarakat dalam pengembangan program KRPL (Kawasan Rumah Pangan Lestari)				Evaluasi dan pencatatan semua program yang sudah berjalan.			

Gambar 4.10 Breakdown Program Great Indonesia Tahun 2019

**Tabel 4.1 Kegiatan Sosialisasi Program Great Indonesia**

Bulan	Program PMT	Durasi
Agustus	Pemberian Susu	4 Kali
	Pemberian Pisang	4 Kali
	Pemberian Susu	4 Kali
	Pemberian Pisang	4 Kali
	Pemberian Susu	4 Kali
	Pemberian Pisang	4 Kali

(Sumber: Diolah peneliti, 2022)

**Tabel 4.2 Kegiatan PMT Program Great Indonesia**

Bulan	Program Sosialisasi
Agustus	Pengenalan tentang pentingnya aktivitas fisik
	Pengenalan tentang penyakit yang berakibat apabila tidak menerapkan gaya hidup sehat
	Pengenalan tentang pentingnya sarapan
	Pengenalan jenis-jenis makanan sehat dan tidak sehat
	Pemberian pengetahuan apa itu susu dan bagaimana susu yang baik untuk anak-anak
	Sosialisasi tentang pentingnya gizi berimbang untuk ibu hamil
	Sosialisasi penggunaan pisang sebagai MPASI
September	Pengenalan tentang gizi berimbang kepada orangtua murid
	Pengenalan buah-buahan sehat
	Pengenalan tentang budaya cuci tangan pakai sabun (CTPS)
	Sosialisasi tentang pentingnya ASI/Promosi dan Konseling Menyusui
Oktober	Pemberian pengayaan orangtua tentang wadah air minum tidak sekali pakai
	Pengenalan tentang 1000 Hari Pertama Kehidupan
	Pengenalan program Great Indonesia, Stunting dan KRPL (Kawasan Rumah Pangan Lestari) inisiasi program KRPL pada masyarakat
November	Konseling bagi para pengasuh balita yang ada di rumah selain orangtua
	Inisiasi dan pelatihan bagi masyarakat dalam pengembangan program KRPL (Kawasan Rumah Pangan Lestari)
Desember	Kegiatan mengukur berat badan dan tinggi badan

	Pembelajaran tentang berat badan ideal untuk anak-anak
	Konseling untuk millennial dengan <i>gimmification</i> dan minum susu bersama
	Evaluasi dan pencatatan semua program yang sudah berjalan

(Sumber: Diolah peneliti, 2022)



Gambar 4.11 Kegiatan PMT di TK Al Hidayah Buyung Udik



Gambar 4.12 Kegiatan PMT di TK Islam An-Nur Gunung Batin Udik



Gambar 4.13 Kegiatan PMT pemberian pengayaan, pembelajaran dan sosialisasi mengenai kebutuhan gizi dan cara asuh anak serta balita di Posyandu Gunung Batin Udik

(Sumber: Great Indonesia GGF Summary)

## VI. KESIMPULAN DAN SARAN

### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa bahwa model kerjasama yang digunakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah dan PT Great Giant Pineapple setelah diteliti dengan teori *Public Private Partnership* adalah model kerjasama *strategic partnering*. Hal ini karena hasil penelitian menunjukkan semua indikator-indikator sesuai dengan model kerjasama *strategic partnering* sebagai berikut:

#### 1. Tujuan

Tujuan dari Program kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah dan PT Great Giant Pineapple adalah memungkinkan pemerintah untuk mendapatkan pembiayaan dalam pelaksanaan program pencegahan *stunting*.

#### 2. Mekanisme

Mekanisme pelaksanaan program yang berjalan dalam kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah dan PT Great Giant Pineapple ini merupakan kemitraan jangka menengah dalam kurun waktu 5 tahun ke atas yang tidak terbatas hanya antara pemerintah dan aktor swasta serta kerjasama berdasarkan kepercayaan dan kebersamaan melebihi kontrak formal yaitu berbentuk piagam kerjasama.

### 3. Pembiayaan

Pembiayaan dalam program kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah dan PT Great Giant Pineapple yaitu kedua pihak membiayai program Great Indonesia bersama-sama.

### 4. Skala Waktu

Skala waktu yang berjalan dalam program kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah dan PT Great Giant Pineapple memiliki skala waktu jangka menengah sampai jangka panjang.

### 5. Relasi Kemitraan

Relasi kemitraan yang dibangun dalam rogram kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah dan PT Great Giant Pineapple ini membangun relasi kemitraan berbasis kepercayaan, mempererat kolaborasi antar organisasi, serta menggantikan instrumen hukum dengan kepercayaan karena tidak adanya kontrak formal yang mengikat.

## 6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai model kerjasama pemerintah lampung tengah dan PT Great Giant Pineapple dalam mengatasi *stunting*, maka Peneliti ingin memberikan saran yaitu:

1. Untuk Pemerintah, terkait mekanisme kerjasama baiknya menyediakan kontrak kerjasama berbentuk MoU untuk memperjelas apa saja yang menjadi bagian dan tanggung jawab masing-masing pihak. MoU juga bisa mencantumkan jangka waktu kerjasama sehingga jelas akan sampai kapan kerjasama ini berlangsung. Tidak adanya MoU ini tentu agak membuat pemerintah kesulitan terkait tupoksi masing-masing. Terkait dengan pembiayaan bisa membuat rincian kebutuhan gizi masing-masing anak pada setiap lokasi Great Indonesia, sehingga jika *supply* dari PT Great Giant Pineapple lebih dari kebutuhan maka bisa di alokasikan di lokasi lain

yang juga membutuhkan dan akan dialokasikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah. Pembiayaan antara kegiatan pemerintah dan kerjasama dengan swasta juga baiknya dipisah untuk memudahkan pelaporan kegiatan.

2. Untuk PT Great Giant Pineapple, terkait skala waktu baiknya ditentukan berapa lama kegiatan ini akan berjalan dan berapa lama program kegiatan ini ada dalam suatu desa untuk berpindah ke desa yang lainnya. Hal ini bisa ditentukan dengan menentukan batasan berapa persen angka *stunting* yang ingin dicapai pada setiap daerahnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdulsyani, 1994. *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mustafa, Abdul Talib. 2017. *Kemitraan dalam Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Calpulis.
- Wibisono, Yusuf. 2007. *Membedah konsep dan aplikasi CSR*. Gresik: Fascho Publishing.
- Widodo, Joko. 2011. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabet.
- Fuad, Anis. Nugroho, Kandung S. 2014. *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

### Jurnal

- Aridiyah, F. O., Rohmawati, N., & Ririanty, M. (2015). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kejadian *Stunting* pada Anak Balita di Wilayah Pedesaan dan Perkotaan (The Factors Affecting *Stunting* on Toddlers in Rural and Urban Areas). *Pustaka Kesehatan*, 3(1), 163-170.
- Berawi, K. N. (2019). Peningkatan Status Gizi Dan Kesehatan Anak Balita Melalui Peningkatan Perilaku Sehat Ibu Di Bangunrejo Lampung Tengah. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sakai Sambayan*, 3(1), 38-42.
- Black, R. E., Allen, L. H., Bhutta, Z. A., Caulfield, L. E., De Onis, M., Ezzati, M., ... & Maternal and Child Undernutrition Study Group. (2008). *Maternal and child undernutrition: global and regional exposures and health consequences*. *The lancet*, 371(9608), 243-260.
- Marnelly, T. R. (2012). *Corporate Social Responsibility (CSR): Tinjauan teori dan praktek di Indonesia*. *Jurnal Aplikasi Bisnis*, 2(2), 49-59.

- Nirmalasari, N. O. (2020). Stunting Pada Anak: Penyebab Dan Faktor Risiko Stunting Di Indonesia. *Qawwam*, 14(1), 19-28.
- Rahmadhita, K. (2020). Permasalahan *Stunting* dan Pencegahannya. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada*, 9(1), 225-229.
- Soesilowati, E., Indriyanti, D. R., & Widiyanto, W. (2011). Model *Corporate Social Responsibility* Dalam Program Pemberdayaan Petani Hortikultura. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi dan Pembangunan*, 12(1), 102-11.
- Ikasari, Anna Cristiana. (2018). Tinjauan Model Kerjasama Daerah di Kabupaten Bekas. *Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi (JIMIA) No.1*.

### **Skripsi**

- Aditya, D. A. 2011. Implementasi *Corporate Social Responsibility (CSR)* Terhadap Perusahaan (Studi di PT Sidomuncul Semarang). UNS: Semarang.
- Bahrudin, M. E. 2019. Kerjasama Antara Pemerintah Daerah Dengan Swasta Dalam Pembangunan Infrastruktur di Bidang Pendidikan. Uninvestas Jember: Jember.
- Mukhtar, Alphian. 2021. Kerjasama Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Pembangunan di Desa Paria Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang. UMM: Makassar.
- Siddik, Ahmad. 2020. Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan *CSR (Corporate Social Responsibility)* Di PT. Perkebunan Nusantara XIV Desa Arasoe Kecamatan Cina Kabupaten Bone. Skripsi. UMM: Makassar.
- Silvia, Febi Rahma. 2019. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanggulangan *Stunting* (Gangguan Pertumbuhan Pada Anak) didesa Pancasila Kecamatan Natar Lampung Selatan. UIN RIL: Lampung.
- Ghoni, Khoirul Abror Ad-Dluha. 2019. Penerapan *Public Private Partnership* dalam Pelaksanaan Program *Corporate Social Responsibility* di Bidang Pendidikan (Studi Kasus Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* PT. Kaltim Prima Coal di Kecamatan Bengalon). Universitas Brawijaya: Malang.

### **Dokumen Lainnya**

- Badan Pusat Statistik. Persentase Balita Pendek Dan Sangat Pendek (Persen), 2016-2018.
- BAPPENAS. Pemerintah Daerah. Diakses dari <https://cegahstunting.id/kategori/pemerintah/pemerintah-daerah/#:~:text=Pemerintah%20Kabupaten%20Kota%20memainkan%20peranan,anggaran%2C%20dukungan%20logistik%20serta%20kemitraan%20pada%20Mei%202022>.
- Best Practice* Program Pencegahan *Stunting* Kabupaten Lampung Tengah, 2020

- Dinkes Lampung-Tengah. (2019). Lokasi Kampung *Stunting* Kabupaten Lampung Tengah.
- Dinkes Lampung-Tengah. (2022) Profile Dinas Kesehatan Lampung Tengah diakses dari <https://diskes.lampungengahkab.go.id/index> pada 05 Oktober 2022
- Diskominfo Lampung Tengah. (2019). Kependudukan. Diakses dari <https://web.lampungengahkab.go.id/kependudukan-dan-naker> pada 11 Agustus 2022.
- Factualmedia.co. (2019). Lamteng Raih Tiga Penghargaan Penilaian Penurunan Stunting diakses di <http://faktualmedia.co/lamteng-raih-tiga-penghargaan-penilaian-penurunan-stunting/> pada 12 November 2022
- Hasanah, Sovia. (2017). Arti dan Maksud Tugas Pembantuan Pemerintah. Diakses di <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-dan-maksud-tugas-pembantuan-pemerintah-lt58b4dd94d9b04> pada 27 Maret 2022.
- GREAT INDONESIA Summary, 2019.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2017). Penilaian Status Gizi.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2018). Hasil Utama Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS). *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical*, 44(8), 1–200.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2016). Situasi Balita Pendek. *ACM SIGAPL APL Quote Quad*, 29(2), 63–76.
- Kemntrian Kesehatan Republik Indonesia. (2016). Situasi balita pendek. Jakarta: Pusat Data dan Informasi Kemntrian Kesehatan Republik Indonesia.
- Sustainability Report* Great Giant Foods, 2019.
- Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. (2017). Buku saku desa dalam penanganan *stunting*. *Buku Saku Desa Dalam Penanganan Stunting*, 42.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2016). Situasi Balita Pendek. *ACM SIGAPL APL Quote Quad*, 29(2), 63–76. <https://doi.org/10.1145/379277.312726>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2017). Penilaian Status Gizi.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2018). Hasil Utama Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS).
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. (2018). Siaran Pers *Stunting Summit* : 229.
- Padiana, Eva. (2019). GGF dan Pemkab Sinergi Tekan Angka *Stunting* di Lampung Tengah. Diakses dari <https://mediaindonesia.com/nusantara/247631/ggf-dan-pemkab-sinergi-tekan-angka-stunting-di-lampung-tengah> diakses pada 6 Maret 2022.

Pranata, Yudha. (2020). GGF Luncurkan Program Great Indonesia. Diakses dari [radarlampung.co.id/ggf-luncurkan-program-great-indonesia/](http://radarlampung.co.id/ggf-luncurkan-program-great-indonesia/) pada 3 Maret 2020.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1962 Tentang Bank Pembangunan Swasta.

Undang-Undang No. 25 Tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (PT).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Zakky. 2022. Fungsi Pemerintah Beserta Tujuan dan Perannya Bagi Masyarakat diakses dari <https://www.seluncur.id/fungsi-pemerintah/> pada 11 Agustus 2022.